



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Pengadilan Negeri Pulang Pisau TAHUN 2021



Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau
74812, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



RINGKASAN EKSEKUTIF



Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *voorpost* Mahkamah Agung RI bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Seluruh program kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020-2024 secara konsisiten, terus menerus dan berkesinambungan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

| Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | | | | |
|---|---|--------|-----------|------------|
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17% |
| | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17% |
| | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % | 88,96% | 126.24 % |
| | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % | 95,86 % | 119,82 % |
| | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % | 100,00 % | 111,11 % |
| | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan | 2 % | 25 % | 1250 % |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|--------|---------|
| dengan Diversi | | | | |
| | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % | 98.01% | 122.51% |

| Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | | |
|--|--|--------|-----------|------------|
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2 | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % |
| | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % |
| | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % | 2,38% | 119,00% |
| | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % | 100% | 105,26% |
| | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % | 100% | 111,11% |

| Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | | | | |
|--|--|--------|-----------|------------|
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3 | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7% | 50% | 714.29 % |

| Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | | | | |
|--|---|--------|-----------|------------|
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4 | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100% | 111.11% |



**KATA
PENGANTAR**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021.

Melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau, diharapkan dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Pulang Pisau, 24 Pebruari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li





“ DAFTAR ISI



| | |
|-------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| C. Sistematika Penyajian..... | 3 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 5 |
| Rencana Kinerja Tahun 2021..... | 5 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 10 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 10 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 74 |
| BAB IV PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 78 |
| LAMPIRAN | |



BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Reformasi yang terjadi di Indonesia membuat segenap komponen bangsa berlomba untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya yang menuju pada perbaikan. Demikian pula dengan Aparatur Negara sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya demi keberlangsungan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi telah menjadi isu sentral dalam penataan pemerintahan dan pendayagunaan segenap aparatur negara, sehingga reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana Kekuasaan Yudikatif, serta sebagai Peradilan Negara yang tertinggi beserta badan-badan peradilan dibawahnya tak luput juga dituntut untuk menerapkan Reformasi Birokrasi. Mahkamah Agung tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan satu atap memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010

| Sasaran Strategis V : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau | | | | |
|--|---|--------|-----------|------------|
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | Persentase pengawasan keuangan perkara | 90% | 100% | 111,11% |
| | Persentase pengawasan keuangan DIPA | 90% | 100% | 111,11% |
| | Persentase pengawasan bidang administrasi umum | 90% | 100% | 111,11% |
| | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis | 10% | 38,09% | 380,9% |
| | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum | 10% | 28,57% | 285,7% |
| | Persentase realisasi PNBP | 50% | 159,71% | 319,41% |
| | Persentase realisasi anggaran belanja | 90% | 98,01% | 108,9% |

–2025. Kemudian implementasi SAKIP di Evaluasi berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Negeri Pulang Pisau akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter Kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau (PN Pulang Pisau) adalah Pengadilan tingkat pertama kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan wilayah Yurisdiksi Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang meliputi 8 Kecamatan 91 Desa Definiti, 1 Desa Persiapan, 1 UPT Anjir Pulang Pisau dan 2 kelurahan.

2. Tugas

Sesuai Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PN Pulang Pisau mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Perdata maupun Pidana) ditingkat pertama. Tugas lain *in casu* Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di Daerahnya apabila diminta sebagaimana yang diamanatkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PN Pulang Pisau memiliki fungsi sebagai berikut:

- o Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
- o Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya ;
- o Memberikan pelayanan internal kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2021 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam PermenPAN & RB Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 yakni sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan**, Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi yang meliputi Aspek strategisnya berupa kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- BAB II Perencanaan Kinerja**, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021
- BAB III Akuntabilitas Kinerja**, Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan melakukan analisis perbandingan target dengan realisasi tahun 2021, perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 PN Pulang Pisau, Analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan tahun 2021, dan analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang berhasil menunjang keberhasilan atau menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Serta Realisasi Anggaran tahun 2021.

BAB IV Penutup, Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) yang ditujukan untuk menjawab segala tuntutan lingkungan strategi baik yang bersifat lokal, regional, nasional bahkan tuntutan global dalam tatanan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Renstra tentu melalui pendekatan strategis yang konkrit, agar Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat merealisasikan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya terhadap masyarakat pencari keadilan, dengan cara menanamkan rasa memiliki dan meningkatkan kedisiplinan melalui tertib administrasi dan tertib perkantoran, serta menjalankan tugas secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada hakekatnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah “*TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG*” Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sehingga Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan visi sebagai berikut :

“*TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU YANG AGUNG.*”

Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan misi sesuai dengan misi Mahkamah Agung dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yakni sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari uraian sebelumnya, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah bisa menjadi PENGADILAN NEGERI YANG AGUNG. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mencapai Visi tersebut menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. *Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;*
2. *Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;*
3. *Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;*
4. *Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.*

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah:

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;*
2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;*
3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;*
4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;*

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- *Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan*

- *Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan*
- *Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu*
- *Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu*
- *Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*
- *Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*
- *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali*
- *Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi*
- *Index Kepuasan Pencari Keadilan*

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

- *Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu*
- *Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi*
- *Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu*
- *Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus*

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)*

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)*

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase pengawasan keuangan perkara*
- *Persentase pengawasan keuangan DIPA*
- *Persentase pengawasan bidang administrasi umum*
- *Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis*
- *Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administasi umum*

- *Persentase realisasi PNB*
- *Persentase realisasi anggaran belanja*

Pada Tahun 2021, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan target pencapaian rencana kinerja sebagai berikut :

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Tahun Anggaran : 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % |

| | | | |
|---|---|--|-----|
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |
| 5 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau | Persentase pengawasan keuangan perkara | 90% |
| | | Persentase pengawasan keuangan DIPA | 90% |
| | | Persentase pengawasan bidang administrasi umum | 90% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis | 10% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administasi umum | 10% |
| | | Persentase realisasi PNBP | 50% |
| | | Persentase realisasi anggaran belanja | 90% |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi sedangkan Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja tersebut telah mendekati perwujudan Visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya maka harus dilakukan pengukuran dalam beberapa kriteria, antara lain :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2021
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis PN Pulang Pisau

Oleh sebab itu untuk mengukur capaian kinerja PN Pulang Pisau pada tahun 2021 ini, maka akan diuraikan sebagai berikut:

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau di tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase |
|--|--|---|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % | 88,96% | 126,24 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % | 95,86 % | 119,82 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % | 100,00 % | 111,11 % |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % | 25 % | 1250 % |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % | 98,01% | 122,51% |
| | | 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % |
| Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % | | | 100 % | 104,17 % |
| Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % | | | 2,38% | 119,00% |
| Persentase Berkas | 95 % | | | 100% | 105,26% |

| | | | | | |
|---|---|--|------|---------|----------|
| | | Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | | | |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % | 100% | 111,11% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7% | 50% | 714.29 % |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100% | 111.11% |
| 5 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau | Persentase pengawasan keuangan perkara | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase pengawasan keuangan DIPA | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase pengawasan bidang administrasi umum | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis | 10% | 38,09% | 380,9% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administasi umum | 10% | 28,57% | 285,7% |
| | | Persentase realisasi PNBPN | 50% | 159,71% | 319,41% |
| | | Persentase realisasi anggaran belanja | 90% | 98,01% | 108,9% |

Capaian hasil pengukuran kinerja diatas didapat dengan membandingkan realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan

Bulanan, Laporan Tahunan, dan data dari masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Capaian hasil kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Dalam sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|--|--|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17% |

5 Perkara Perdata yang Belum Putus pada awal tahun terdiri atas 5 Perkara Perdata Gugatan. Dari 5 Perkara tersebut, 3 Perkara Putus pada bulan Januari 2021, 1 Perkara Putus Bulan Maret 2021, dan 1 Perkara Putus Bulan Mei 2021. Sehingga per 31 Desember 2021 tidak ada Perkara Perdata tahun 2020 yang belum Putus. Adapun Perkara Perdata sisa tahun 2020 yang putus tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Sisa Perkara Perdata Tahun 2020 yang Putus Bulan Januari 2021

| Nomor Perkara | Tanggal Masuk | Tanggal Putusan |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 17/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-01-28 | 2020-11-05 |
| 20/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-01-21 | 2020-12-03 |
| 22/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-01-20 | 2020-12-28 |

Sisa Perkara Perdata Tahun 2020 yang Putus Bulan Maret 2021

| Nomor Perkara | Tanggal Masuk | Tanggal Putusan |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 16/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-03-04 | 2020-10-09 |

Sisa Perkara Perdata Tahun 2020 yang Putus Bulan Mei 2021

| Nomor Perkara | Tanggal Masuk | Tanggal Putusan |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 21/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-05-03 | 2020-12-07 |

Jika dibuat diagram batang adalah sebagai berikut:



Indikator ini dihitung sebagai berikut:

| Lintas | | | |
|--------|---|---|---|
| Jumlah | 9 | 9 | 0 |
| | | | 9 |

9 Perkara Pidana yang Belum Putus pada awal tahun terdiri atas 9 Perkara Pidana Biasa. Dari 9 Perkara tersebut, 9 Perkara Putus pada bulan Januari 2021. Adapun Perkara Pidana sisa tahun 2020 yang Putus diuraikan sebagai berikut:

Sisa Perkara Pidana Tahun 2020 yang Putus Bulan Januari 2021

| Nomor Perkara | Tanggal Masuk | Tanggal Putusan |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 88/Pid.B/2020/PN Pps | 2021-01-07 | 2020-11-11 |
| 93/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-07 | 2020-12-02 |
| 94/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-07 | 2020-12-14 |
| 100/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-07 | 2020-12-17 |
| 95/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-11 | 2020-12-14 |
| 98/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-11 | 2020-12-14 |
| 99/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-11 | 2020-12-17 |
| 97/Pid.B/2020/PN Pps | 2021-01-21 | 2020-12-14 |
| 96/Pid.B/2020/PN Pps | 2021-01-28 | 2020-12-14 |

Jika dibuat diagram adalah sebagai berikut:



Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana tahun 2020 yang Diselesaikan Per 31 Desember 2021}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2020 Yang Harus Diselesaikan Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{9}{9} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 100% sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 100 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 100\%$$

c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

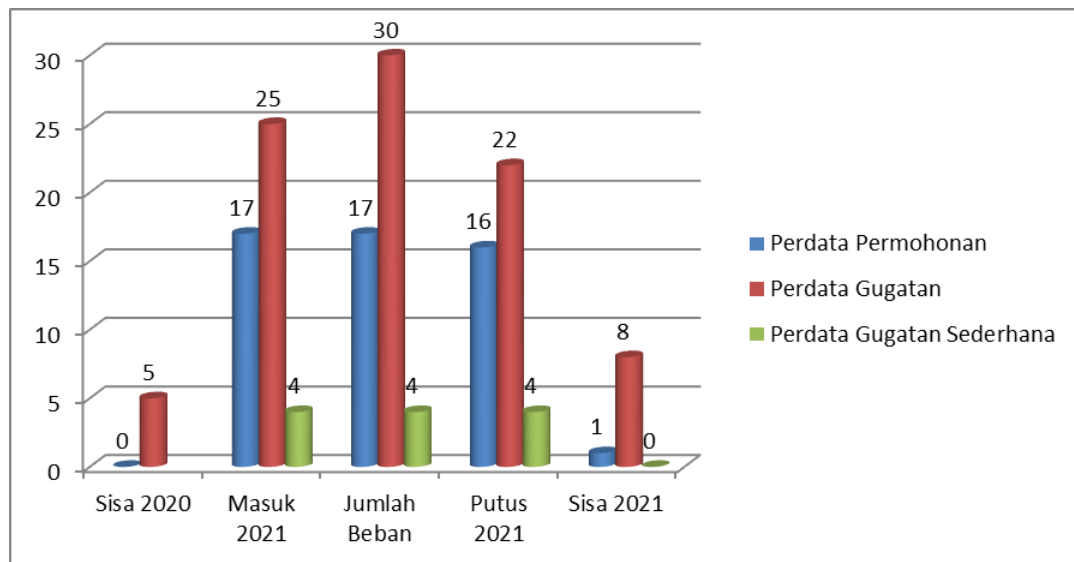
Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui jumlah Perkara Perdata Sisa tahun 2020 dan perkara Perdata yang masuk selama tahun 2021.

| Jenis Perkara | Sisa 2020 | Masuk 2021 | Jumlah Beban | Putus 2021 | Sisa 2021 | Ratio Produktivitas |
|----------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------------------|
| Perdata Permohonan | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 94.11 |
| Perdata Gugatan | 5 | 25 | 30 | 22 | 8 | 73.3 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| Jumlah | 5 | 46 | 51 | 42 | 9 | 82.35 |

Rerata waktu memutus perkara tahun 2021 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana berikut:

| Jenis Perkara | Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan) | | | Jumlah |
|----------------------------------|--|---------|------------|--------|
| | 1 s/d 3 | 3 s/d 6 | > 6 s/d 12 | |
| Perdata Permohonan | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Perdata Gugatan | 7 | 15 | 0 | 22 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 4 | 0 | 0 | 4 |

Sehingga jika dibuat Diagramnya adalah sebagai berikut:



Adapun distribusi Perkara Perdata yang masuk dan putus selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Jenis Perkara | Sisa Perkara tahun 2021 (Per 01 Januari 2021) | Info | Perkara Masuk dan Putus Selama Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | Perkara Masuk 2021 | Jumlah Perkara Yang Ditangani Tahun 2021 |
|-----------------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Perkara Perdata Gugatan | 5 | Masuk | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 30 |
| | | Putus | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |
| Perkara Perdata Permohonan | 0 | Masuk | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 |
| | | Putus | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| Perkara Perdata Gugatan Sederhana | 0 | Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| | | Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |

Selama tahun 2021, terdapat Perkara Gugatan yang masuk sebanyak 25 Perkara dan sudah putus selama tahun 2021 sejumlah 22 perkara. Selama tahun 2021 terdapat 4 Gugatan Sederhana yang masuk, sedangkan Perkara Perdata Permohonan masuk sebanyak 17 Perkara Permohonan dan sudah putus sebanyak 16 perkara permohonan.

Sehingga Perkara Perdata yang putus selama tahun 2021 berjumlah 42 dari jumlah beban perkara yang berjumlah 51, sehingga Rasio Produktivitas Perkara Perdata adalah sebesar 82.35%. Untuk mengukur Indikator ini adalah dengan menghitung jumlah Perkara yang diputus dibandingkan jumlah beban perkara yang

ditangani selama tahun 2021. Adapun sumber untuk mengukur ini indikator ini adalah Laporan Bulanan yang diuraikan sebagai berikut:

Perkara Perdata Masuk tahun 2020, Putus 2021

| Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putus | Lama Proses |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 16/Pdt.G/2020/PN Pps | 10/9/2020 | 3/4/2021 | 146 |
| 17/Pdt.G/2020/PN Pps | 11/5/2020 | 1/28/2021 | 84 |
| 20/Pdt.G/2020/PN Pps | 12/3/2020 | 1/21/2021 | 49 |
| 21/Pdt.G/2020/PN Pps | 12/7/2020 | 5/3/2021 | 147 |
| 22/Pdt.G/2020/PN Pps | 12/28/2020 | 1/20/2021 | 23 |

Perkara Perdata Masuk tahun 2021, Putus 2021

| Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tgl Pendaftaran | Tgl Putusan | Lama Penyelesaian |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1/Pdt.G.S/2021/PN Pps | Gugatan Sederhana | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 0 |
| 2/Pdt.G.S/2021/PN Pps | Gugatan Sederhana | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 0 |
| 3/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 2/18/2021 | 2/23/2021 | 5 |
| 7/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 6/3/2021 | 6/10/2021 | 7 |
| 4/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 3/4/2021 | 3/12/2021 | 8 |
| 2/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 2/16/2021 | 2/25/2021 | 9 |
| 16/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 12/8/2021 | 12/17/2021 | 9 |
| 5/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 3/8/2021 | 3/18/2021 | 10 |
| 13/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 10/15/2021 | 10/26/2021 | 11 |
| 14/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 11/11/2021 | 11/22/2021 | 11 |
| 15/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 11/11/2021 | 11/23/2021 | 12 |
| 10/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 7/1/2021 | 7/14/2021 | 13 |
| 1/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 2/16/2021 | 3/2/2021 | 14 |
| 6/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 3/15/2021 | 3/31/2021 | 16 |
| 11/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 7/5/2021 | 7/21/2021 | 16 |
| 12/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 9/27/2021 | 10/14/2021 | 17 |
| 3/Pdt.G.S/2021/PN Pps | Gugatan Sederhana | 11/22/2021 | 12/9/2021 | 17 |
| 8/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 6/14/2021 | 7/5/2021 | 21 |
| 9/Pdt.P/2021/PN Pps | Penetapan | 6/22/2021 | 7/15/2021 | 23 |
| 4/Pdt.G.S/2021/PN Pps | Gugatan Sederhana | 11/22/2021 | 12/16/2021 | 24 |
| 11/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 6/24/2021 | 7/22/2021 | 28 |
| 22/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 10/12/2021 | 11/9/2021 | 28 |
| 6/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 4/5/2021 | 5/4/2021 | 29 |
| 4/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 2/23/2021 | 3/25/2021 | 30 |
| 2/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 2/23/2021 | 3/25/2021 | 30 |
| 3/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 2/23/2021 | 3/25/2021 | 30 |

| | | | | |
|----------------------|---------|-----------|------------|-----|
| 5/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 3/23/2021 | 5/4/2021 | 42 |
| 13/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 7/13/2021 | 8/24/2021 | 42 |
| 7/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 4/12/2021 | 5/25/2021 | 43 |
| 9/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 5/19/2021 | 7/15/2021 | 57 |
| 1/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 1/13/2021 | 3/12/2021 | 58 |
| 20/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 9/16/2021 | 11/25/2021 | 70 |
| 19/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 8/26/2021 | 11/10/2021 | 76 |
| 10/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 6/16/2021 | 9/2/2021 | 78 |
| 8/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 4/22/2021 | 7/22/2021 | 91 |
| 12/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 7/8/2021 | 10/26/2021 | 110 |
| 17/Pdt.G/2021/PN Pps | Gugatan | 7/15/2021 | 12/2/2021 | 140 |

Rerata waktu memutus perkara tahun 2021 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana berikut:

| Jenis Perkara | Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan) | | | Jumlah |
|---------------------------|---|-----------|---------------|-----------|
| | 1 s/d 3 | 3 s/d 5 | > 6 s/d 12 | |
| Perdata Permohonan | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Perdata Gugatan | 7 | 15 | 0 | 22 |
| Perdata Gugatan Sederhana | 4 | 0 | 0 | 4 |
| <i>Jumlah</i> | <i>27</i> | <i>15</i> | <i>0</i> | <i>42</i> |

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Putus < 5 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang Putus 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{42}{42} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100,00 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100,00 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 96 % sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 104,17 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{96\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 104,17\%$$

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui jumlah Perkara Pidana Sisa tahun 2020 dan perkara Pidana yang masuk selama tahun 2021.

| No | Jenis Perkara | Sisa Perkara tahun 2020 | Info | Perkara Masuk dan Putus Selama Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | Perkara Masuk 2021 | Perkara Ditangani |
|---|--------------------|-------------------------|--------------|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Pidana Biasa | 9 | Masuk | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 93 | 102 |
| | | | Putus | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 11 | 12 | 10 | 4 | 5 | | |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| | | | Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| 4 | Pra Peradilan | 0 | Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Putus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Pidana Khusus Anak | 0 | Masuk | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| | | | Putus | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 6 | Pidana Lalu Lintas | 0 | Masuk | 0 | 10 | 8 | 34 | 30 | 14 | 46 | 39 | 55 | 51 | 38 | 25 | 350 | 350 |
| | | | Putus | 0 | 10 | 8 | 34 | 30 | 14 | 46 | 39 | 55 | 51 | 38 | 25 | | |
| Jumlah Perkara (Diluar Pidana Lalu Lintas) | | | Masuk | 7 | 8 | 10 | 12 | 4 | 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 20 | 104 | 113 |
| | | | Putus | 10 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 11 | 12 | 10 | 4 | 13 | 103 | |

Selama tahun 2021, terdapat Perkara Pidana yang masuk sebanyak 104 Perkara, sedangkan Terdapat 9 Perkara Pidana Sisa tahun 2020. Adapun Perkara Pidana yang masuk terdiri dari 102 Perkara Pidana Biasa, 7 Perkara Pidana Cepat, dan 4 Perkara Pidana Khusus anak. Dari Perkara yang masuk tersebut sudah putus 103 Perkara termasuk perkara sisa tahun 2020. Adapun Jumlah Perkara Pidana yang sudah Putus terdiri dari 92 Perkara Pidana Biasa, 7 Perkara Pidana Cepat dan 4 Perkara Pidana Khusus Anak. Adapun Diagram Batang Perkara Perdata adalah sebagai berikut:



Sehingga Jumlah Perkara Sisa tahun 2020, Masuk 2021, dan Beban selama tahun 2021 diuraikan sesuai tabel berikut:

| Jenis Perkara | Sisa 2020 | Masuk 2021 | Jumlah Beban | Putus 2021 | Sisa 2021 | Ratio Produktivitas |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------------------|
| Pidana Biasa | 9 | 93 | 102 | 92 | 10 | 90.2 |
| Pidana Khusus Anak | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| Pidana Cepat | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| Jumlah | 9 | 104 | 113 | 103 | 10 | 91.15 |

Rerata waktu memutus perkara tahun 2021 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana berikut:

| Jenis Perkara | Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan) | | | Jumlah |
|--------------------|--|---------|------------|--------|
| | 1 s/d 3 | 3 s/d 6 | > 6 s/d 12 | |
| Pidana Biasa | 91 | 1 | 0 | 92 |
| Pidana Khusus Anak | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Pidana Cepat | 7 | 0 | 0 | 7 |
| % | 102 | 1 | 0 | 103 |

Perkara Pidana yang putus selama tahun 2021 berjumlah 103 Perkara. Untuk mengukur Indikator ini adalah dengan menghitung Jarak antara Register Pendaftaran Berkas Perkara yang masuk dengan Tanggal Putusan. Adapun sumber untuk mengukur ini indikator ini adalah Laporan Bulanan yang diuraikan sebagai berikut:

Perkara Pidana Masuk tahun 2020, Putus 2021

| Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putusan | Proses Waktu Penyelesaian Perkara |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 88/Pid.B/2020/PN Pps | 11/11/2020 | 1/7/2021 | 57 |
| 93/Pid.Sus/2020/PN Pps | 12/2/2020 | 1/7/2021 | 36 |
| 94/Pid.Sus/2020/PN Pps | 12/14/2020 | 1/7/2021 | 24 |
| 98/Pid.Sus/2020/PN Pps | 12/14/2020 | 1/11/2021 | 28 |
| 95/Pid.Sus/2020/PN Pps | 12/14/2020 | 1/11/2021 | 28 |
| 97/Pid.B/2020/PN Pps | 12/14/2020 | 1/21/2021 | 38 |
| 96/Pid.B/2020/PN Pps | 12/14/2020 | 1/28/2021 | 45 |
| 100/Pid.Sus/2020/PN Pps | 12/17/2020 | 1/7/2021 | 21 |
| 99/Pid.Sus/2020/PN Pps | 12/17/2020 | 1/11/2021 | 25 |

Perkara Pidana Masuk tahun 2021, Putus 2021

| No | NOMOR PERKARA | Jenis Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putusan | Lama Proses |
|----|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 1/Pid.C/2021/PN Pps | Pidana Cepat | 12/16/2021 | 12/16/2021 | 0 |
| 2 | 2/Pid.C/2021/PN Pps | Pidana Cepat | 12/16/2021 | 12/16/2021 | 0 |
| 3 | 3/Pid.C/2021/PN Pps | Pidana Cepat | 12/21/2021 | 12/21/2021 | 0 |
| 4 | 5/Pid.C/2021/PN Pps | Pidana Cepat | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 0 |
| 5 | 6/Pid.C/2021/PN Pps | Pidana Cepat | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 0 |
| 6 | 4/Pid.C/2021/PN Pps | Pidana Cepat | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 0 |
| 7 | 7/Pid.C/2021/PN Pps | Pidana Cepat | 12/30/2021 | 12/30/2021 | 0 |
| 8 | 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | Pidana Anak | 2/11/2021 | 2/18/2021 | 7 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----|
| 9 | 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Pps | Pidana Anak | 4/15/2021 | 4/22/2021 | 7 |
| 10 | 3/Pid.Sus- Anak/2021/PN Pps | Pidana Anak | 4/20/2021 | 4/30/2021 | 10 |
| 11 | 1/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 1/13/2021 | 1/26/2021 | 13 |
| 12 | 29/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/6/2021 | 4/19/2021 | 13 |
| 13 | 9/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 2/8/2021 | 2/24/2021 | 16 |
| 14 | 17/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/4/2021 | 3/22/2021 | 18 |
| 15 | 81/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 11/18/2021 | 12/7/2021 | 19 |
| 16 | 79/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 11/17/2021 | 12/7/2021 | 20 |
| 17 | 2/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 1/13/2021 | 2/3/2021 | 21 |
| 18 | 57/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 8/9/2021 | 8/31/2021 | 22 |
| 19 | 58/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 8/9/2021 | 8/31/2021 | 22 |
| 20 | 4/Pid.Sus- Anak/2021/PN Pps | Pidana Anak | 12/7/2021 | 12/29/2021 | 22 |
| 21 | 20/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/9/2021 | 4/1/2021 | 23 |
| 22 | 83/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 12/7/2021 | 12/30/2021 | 23 |
| 23 | 84/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 12/7/2021 | 12/30/2021 | 23 |
| 24 | 82/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 12/7/2021 | 12/30/2021 | 23 |
| 25 | 3/Pid.B/LH/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 1/14/2021 | 2/8/2021 | 25 |
| 26 | 34/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/15/2021 | 5/11/2021 | 26 |
| 27 | 21/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/17/2021 | 4/13/2021 | 27 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|------------|------------|----|
| 28 | 14/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 2/10/2021 | 3/10/2021 | 28 |
| 29 | 15/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/2/2021 | 3/30/2021 | 28 |
| 30 | 22/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/17/2021 | 4/14/2021 | 28 |
| 31 | 23/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/18/2021 | 4/15/2021 | 28 |
| 32 | 11/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 2/9/2021 | 3/10/2021 | 29 |
| 33 | 61/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 8/18/2021 | 9/16/2021 | 29 |
| 34 | 74/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/20/2021 | 10/21/2021 | 31 |
| 35 | 78/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 10/21/2021 | 11/23/2021 | 33 |
| 36 | 6/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 1/21/2021 | 2/24/2021 | 34 |
| 37 | 13/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 2/10/2021 | 3/16/2021 | 34 |
| 38 | 24/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/18/2021 | 4/21/2021 | 34 |
| 39 | 41/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/2/2021 | 7/6/2021 | 34 |
| 40 | 64/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 8/20/2021 | 9/23/2021 | 34 |
| 41 | 76/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 10/19/2021 | 11/22/2021 | 34 |
| 42 | 7/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 1/21/2021 | 2/25/2021 | 35 |
| 43 | 5/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 1/21/2021 | 2/25/2021 | 35 |
| 44 | 16/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/4/2021 | 4/8/2021 | 35 |
| 45 | 19/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/9/2021 | 4/13/2021 | 35 |
| 46 | 39/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/2/2021 | 7/7/2021 | 35 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|------------|------------|----|
| 47 | 60/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 8/12/2021 | 9/16/2021 | 35 |
| 48 | 71/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/16/2021 | 10/21/2021 | 35 |
| 49 | 72/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/16/2021 | 10/21/2021 | 35 |
| 50 | 73/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/16/2021 | 10/21/2021 | 35 |
| 51 | 77/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 10/19/2021 | 11/23/2021 | 35 |
| 52 | 10/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 2/9/2021 | 3/17/2021 | 36 |
| 53 | 59/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 8/9/2021 | 9/14/2021 | 36 |
| 54 | 69/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/7/2021 | 10/13/2021 | 36 |
| 55 | 30/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/9/2021 | 5/19/2021 | 40 |
| 56 | 4/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 1/21/2021 | 3/3/2021 | 41 |
| 57 | 40/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/2/2021 | 7/14/2021 | 42 |
| 58 | 62/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 8/19/2021 | 9/30/2021 | 42 |
| 59 | 63/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 8/19/2021 | 9/30/2021 | 42 |
| 60 | 12/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 2/9/2021 | 3/24/2021 | 43 |
| 61 | 27/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/6/2021 | 5/19/2021 | 43 |
| 62 | 38/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 5/18/2021 | 6/30/2021 | 43 |
| 63 | 25/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/5/2021 | 5/19/2021 | 44 |
| 64 | 26/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/5/2021 | 5/19/2021 | 44 |
| 65 | 70/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/14/2021 | 10/28/2021 | 44 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------|-----------|------------|----|
| 66 | 37/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 5/7/2021 | 6/23/2021 | 47 |
| 67 | 65/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/6/2021 | 10/25/2021 | 49 |
| 68 | 66/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/6/2021 | 10/25/2021 | 49 |
| 69 | 68/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/7/2021 | 10/26/2021 | 49 |
| 70 | 18/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 3/8/2021 | 4/27/2021 | 50 |
| 71 | 67/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 9/6/2021 | 10/26/2021 | 50 |
| 72 | 33/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/13/2021 | 6/3/2021 | 51 |
| 73 | 51/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 7/5/2021 | 8/26/2021 | 52 |
| 74 | 75/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 10/1/2021 | 11/22/2021 | 52 |
| 75 | 50/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 7/2/2021 | 8/24/2021 | 53 |
| 76 | 35/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 5/7/2021 | 6/30/2021 | 54 |
| 77 | 48/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/18/2021 | 8/12/2021 | 55 |
| 78 | 54/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 7/14/2021 | 9/8/2021 | 56 |
| 79 | 52/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 7/6/2021 | 9/1/2021 | 57 |
| 80 | 49/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/18/2021 | 8/19/2021 | 62 |
| 81 | 42/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/8/2021 | 8/10/2021 | 63 |
| 82 | 44/Pid.B/LH/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/10/2021 | 8/12/2021 | 63 |
| 83 | 53/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 7/7/2021 | 9/8/2021 | 63 |
| 84 | 56/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 7/21/2021 | 9/22/2021 | 63 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|----|
| 85 | 55/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 7/14/2021 | 9/16/2021 | 64 |
| 86 | 28/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/6/2021 | 6/10/2021 | 65 |
| 87 | 32/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/9/2021 | 6/16/2021 | 68 |
| 88 | 36/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 5/7/2021 | 7/14/2021 | 68 |
| 89 | 45/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/10/2021 | 8/19/2021 | 70 |
| 90 | 47/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/17/2021 | 8/26/2021 | 70 |
| 91 | 43/Pid.B/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/8/2021 | 8/18/2021 | 71 |
| 92 | 31/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 4/9/2021 | 6/24/2021 | 76 |
| 93 | 46/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 6/10/2021 | 9/1/2021 | 83 |
| 94 | 8/Pid.Sus/2021/PN Pps | Pidana Biasa | 2/1/2021 | 5/11/2021 | 99 |

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Putus < 5 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Putus 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{103}{103} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100,00 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Diperoleh Realisasi adalah 100,00 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 96 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 104,17 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{96\%} \times 100\%$$

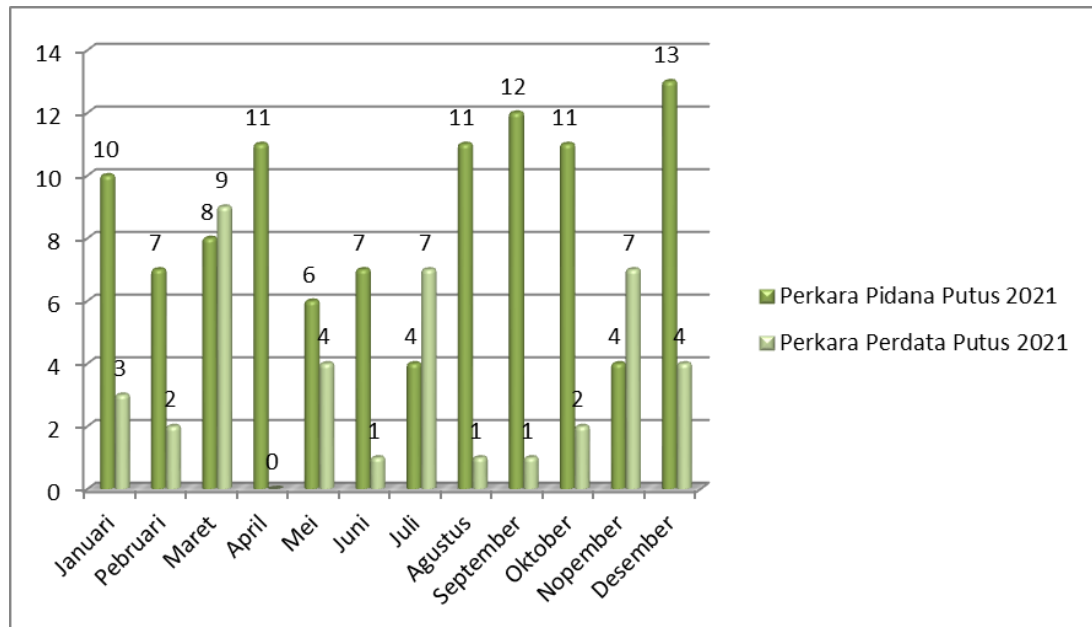
$$\text{Nilai Indikator} = 104,17\%$$

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui adalah jumlah Perkara yang Putus dan mengajukan Banding hingga per 31 Desember 2021.

| Bulan | Jumlah Perkara Diputus | Pidana | Perdata |
|-----------|------------------------|--------|---------|
| Januari | 13 | 10 | 3 |
| Pebruari | 9 | 7 | 2 |
| Maret | 17 | 8 | 9 |
| April | 11 | 11 | 0 |
| Mei | 10 | 6 | 4 |
| Juni | 8 | 7 | 1 |
| Juli | 11 | 4 | 7 |
| Agustus | 12 | 11 | 1 |
| September | 13 | 12 | 1 |
| Oktober | 13 | 11 | 2 |
| Nopember | 11 | 4 | 7 |
| Desember | 17 | 13 | 4 |
| Total | 145 | 104 | 41 |

Adapun Jumlah Perkara Diputus selama tahun 2021 berjumlah 145 Perkara, dengan 104 Perkara Pidana dan 41 Perkara Perdata. Distribusi Jumlah Perkara yang diputus selama tahun 2021 berdasarkan diagram berikut ini:



hasil analisis Perkara Yang Putus di Pengadilan Negeri dan yang mengajukan Banding dapat diuraikan sebagai berikut ini:

| Bulan | Jumlah Perkara Diputus | Perkara Pidana Mengajukan Banding | Perkara Perdata Mengajukan Banding | Mengajukan Banding | Tidak mengajukan banding |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Januari | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Pebruari | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Maret | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| April | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Mei | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Juni | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Juli | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Agustus | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| September | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Oktober | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Nopember | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Desember | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 145 | 14 | 2 | 16 | 129 |

dari 145 Putusan Perkara, 16 Perkara mengajukan banding dan 129 Perkara Tidak mengajukan Banding. Jika dibuat secara triwulan maka Perkara yang diputus dan yang mengajukan Banding adalah sebagai berikut:

| Triwulan | Jumlah Perkara Diputus | Mengajukan Banding | Tidak mengajukan banding |
|----------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 39 | 4 | 35 |
| 2 | 29 | 3 | 26 |
| 3 | 36 | 6 | 30 |
| 4 | 41 | 3 | 38 |

| | | | |
|--------|-----|----|-----|
| Jumlah | 145 | 16 | 129 |
|--------|-----|----|-----|

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus 2021}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{129}{145} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 88.96 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 88.96 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 71 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 126,24 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{89.63 \%}{71\%} \times 100\%$$

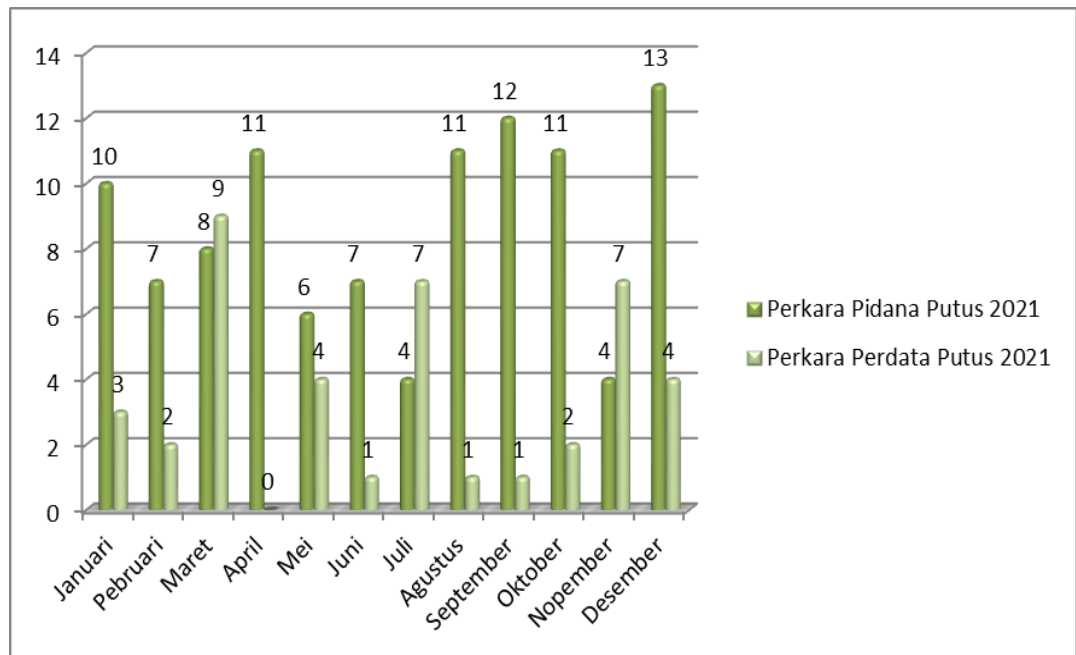
$$\textit{Nilai Indikator} = 126.24 \%$$

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Untuk Mengetahui Indikator ini, maka harus diketahui adalah jumlah Perkara yang Putus dan mengajukan Kasasi hingga per 31 Desember 2021.

| Bulan | Jumlah Perkara Diputus | Pidana | Perdata |
|------------------|------------------------|--------|---------|
| Januari | 13 | 10 | 3 |
| Pebruari | 9 | 7 | 2 |
| Maret | 17 | 8 | 9 |
| April | 11 | 11 | 0 |
| Mei | 10 | 6 | 4 |
| Juni | 8 | 7 | 1 |
| Juli | 11 | 4 | 7 |
| Agustus | 12 | 11 | 1 |
| September | 13 | 12 | 1 |
| Oktober | 13 | 11 | 2 |
| Nopember | 11 | 4 | 7 |
| Desember | 17 | 13 | 4 |
| Total | 145 | 104 | 41 |

Adapun Jumlah Perkara Diputus selama tahun 2021 berjumlah 145 Perkara, dengan 104 Perkara Pidana dan 41 Perkara Perdata. Distribusi Jumlah Perkara yang diputus selama tahun 2021 berdasarkan diagram berikut ini:



hasil analisis Perkara Yang Putus di Pengadilan Negeri dan yang mengajukan Banding dapat diuraikan sebagai berikut ini:

| Bulan | Jumlah Perkara Diputus | Mengajukan Kasasi | Tidak mengajukan Kasasi |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| Januari | 13 | 1 | 12 |
| Pebruari | 9 | | 9 |
| Maret | 17 | 1 | 16 |
| April | 11 | | 11 |
| Mei | 10 | | 10 |
| Juni | 8 | | 8 |
| Juli | 11 | | 11 |
| Agustus | 12 | 1 | 11 |
| September | 13 | | 12 |
| Oktober | 13 | 1 | 12 |
| Nopember | 11 | | 11 |
| Desember | 17 | 2 | 15 |
| Total | 145 | 6 | 139 |

dari 145 Putusan Perkara, 6 Perkara mengajukan Kasasi dan 139 Perkara Tidak mengajukan Kasasi. Jika dibuat secara triwulan maka Perkara yang diputus dan yang mengajukan Kasasi adalah sebagai berikut:

| Triwulan | Jumlah Perkara Diputus | Mengajukan Kasasi | Tidak mengajukan Kasasi |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 39 | 2 | 37 |
| 2 | 29 | 0 | 29 |
| 3 | 36 | 1 | 35 |
| 4 | 41 | 3 | 38 |
| Total | 145 | 6 | 139 |

Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus 2021}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{139}{145} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 95,86 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 95,86%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 80% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 119,82 Persen sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\textit{Nilai Indikator} = = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{95,86 \%}{80\%} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = 119,82 \%$$

g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali hingga per 31 Desember 2021 adalah 0 Perkara. Sehingga Indikator ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak PK}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus 2021}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{145}{145} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 100,00 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100,00%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 90% sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 111,11 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 111,11\%$$

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menangani Perkara Pidana Khusus anak berjumlah 4 Perkara, dari 4 Perkara tersebut ada 1 Perkara yang diselesaikan dengan diversi. Informasi Perkara Pidana Khusus Anak adalah sebagai berikut:

| No | Nama Perkara | Jumlah Perkara Anak | Jumlah Yang diversi |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Pidana Khusus Anak | 4 | 1 |

Indikator ini diperoleh dari laporan Bulanan yang dapat diungkapkan sebagai berikut:

| Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Putusan |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | 11 Pebruari 2021 | 22 April 2021 |
| 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | 15 April 2021 | 18 Pebruari 2021 |
| 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | 20 April 2021 | 30 April 2021 |
| 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | 07 Desember 2021 | 29 Desember 2021 |

Sehingga Indikator ini dihitung sebagai berikut:

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang Putus 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{1}{4} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 25\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 25%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 2 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 1250 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{25\%}{2\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 1250\%$$

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan dievaluasi dan dihitung berdasarkan Hasil Analisa Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan. Responden terdiri dari 90 orang dengan penilaian terhadap 9 Ruang Lingkup Pelayanan yang meliputi:

- Persyaratan
- Prosedur
- Waktu Pelayanan
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku Pelaksana
- Maklumat Pelayanan
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Survey dilaksanakan Setiap Semester.

Hasil Survey Semester I TA 2021

| Nomor | Ruang Lingkup | Nilai | Kategori | Nilai Konversi |
|-------|---|--------|-------------|----------------|
| 1 | Persyaratan | 3.972 | Sangat Baik | 0.993 |
| 2 | Prosedur | 3.972 | Sangat Baik | 0.993 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3.958 | Sangat Baik | 0.989 |
| 4 | Biaya/Tarif | 3.972 | Sangat Baik | 0.993 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.972 | Sangat Baik | 0.993 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.986 | Sangat Baik | 0.996 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.972 | Sangat Baik | 0.993 |
| 8 | Maklumat Pelayanan | 3.944 | Sangat Baik | 0.986 |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4.000 | Sangat Baik | 1.000 |
| | Jumlah | 35.746 | | 8.936 |
| | Rata-rata | 3.972 | | 99.29 |

Persentase Indikator

$$= \frac{\text{Nilai Hasil Survey}}{\text{Nilai Ideal}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{99.29}{100} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 99,29 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 99.29%.

Hasil Survey Semester II TA 2021

| Nomor | Ruang Lingkup | Nilai | Kategori | Nilai Konversi |
|-------|------------------------------------|-------|-------------|----------------|
| 1 | Persyaratan | 3.897 | Sangat Baik | 0.9743 |
| 2 | Prosedur | 3.872 | Sangat Baik | 0.9680 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3.821 | Sangat Baik | 0.9553 |
| 4 | Biaya/Tarif | 3.846 | Sangat Baik | 0.9615 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.846 | Sangat Baik | 0.9615 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.821 | Sangat Baik | 0.9553 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.872 | Sangat Baik | 0.9680 |
| 8 | Maklumat Pelayanan | 3.846 | Sangat Baik | 0.9615 |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran | 4.000 | Sangat Baik | 1.0000 |

| | | | | |
|--|-------------|--------|--|--------|
| | dan Masukan | | | |
| | Jumlah | 34.821 | | 8.7053 |
| | Rata-rata | 3.869 | | 96.725 |

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Nilai Hasil Survey}}{\text{Nilai Ideal}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{96.725}{100} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 96.73 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 96,73 %.

Rerata dalam Tahun 2021 terdapat dua realisasi semester I 99.29 % dan Semester II 96.73% sehingga rata-rata adalah 98.01 %.

sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 80 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 122.51 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{98.01 \%}{80 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 122.51 \%$$

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dalam sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ini terdiri dari 4 (empat) indikator utama. Adapun pencapaian realisasi kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|--|---|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para | 96 % | 100 % | 104,17 % |

| Perkara | Pihak tepat waktu | | |
|--|-------------------|-------|----------|
| Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % |
| Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % | 2,38% | 119,00% |
| Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % | 100% | 105,26% |
| Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % | 100% | 111,11% |

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Untuk indikator ini maka Cara Pengukurannya adalah dengan membandingkan tenggang Tanggal Putus Perkara dengan Tanggal Pemberitahuan. Adapun Data yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

| Nomor Perkara | Tanggal Putusan | Tanggal Minutasi | Rentang Waktu (Hari) |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1/Pdt.G.S/2021/PN Pps | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0 |
| 1/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 |
| 1/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0 |
| 10/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0 |
| 10/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0 |
| 11/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0 |
| 11/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 0 |
| 12/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0 |
| 12/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 0 |
| 13/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0 |
| 13/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0 |
| 14/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 |
| 15/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0 |
| 16/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 0 |
| 16/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|---|
| 17/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0 |
| 17/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0 |
| 19/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0 |
| 2/Pdt.G.S/2021/PN Pps | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0 |
| 2/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0 |
| 2/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0 |
| 20/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0 |
| 20/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0 |
| 21/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 0 |
| 22/Pdt.G/2020/PN Pps | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0 |
| 22/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0 |
| 3/Pdt.G.S/2021/PN Pps | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0 |
| 3/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0 |
| 3/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 |
| 4/Pdt.G.S/2021/PN Pps | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 |
| 4/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0 |
| 4/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 |
| 5/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 0 |
| 5/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 0 |
| 6/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 0 |
| 6/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0 |
| 7/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 0 |
| 7/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 0 |
| 8/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0 |
| 8/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0 |
| 9/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0 |
| 9/Pdt.P/2021/PN Pps | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0 |

Dari 42 Perkara Perdata yang diputus tahun 2021, semua perkara diselesaikan dengan *one days minutes*.

Nilai Index ini dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Perkara Yang Tidak Terlambat Pemberitahuan}}{\textit{Jumlah Perkara Perdata Yang ditangani}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{42}{42} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 100\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 96% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 104,17 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{96\%} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = 104,17\%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta register perkara.

b) **Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Untuk indikator ini maka Cara Pengukurannya adalah dengan membandingkan tenggang Tanggal Putus Perkara dengan Tanggal Pemberitahuan. Adapun Data yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

| Nomor Perkara | Tanggal Putusan | Tanggal Minutasi | Rentang Waktu (Hari) |
|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1/Pid.C/2021/PN Pps | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 |
| 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 0 |
| 1/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 0 |
| 10/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 0 |
| 100/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 |
| 11/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 0 |
| 12/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 0 |
| 13/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 0 |
| 14/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 0 |
| 15/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 0 |
| 16/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 0 |
| 17/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0 |
| 18/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 0 |
| 19/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 0 |
| 2/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0 |
| 2/Pid.C/2021/PN Pps | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 |
| 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0 |
| 20/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 |
| 21/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 0 |
| 22/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0 |
| 23/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 0 |
| 24/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0 |
| 25/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 |
| 26/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 |
| 27/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 |
| 28/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 0 |
| 29/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0 |
| 3/Pid.B/LH/2021/PN Pps | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0 |
| 3/Pid.C/2021/PN Pps | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0 |
| 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0 |
| 30/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 |
| 31/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0 |
| 32/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0 |
| 33/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 0 |
| 34/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 0 |
| 35/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0 |
| 36/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|----|
| 37/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0 |
| 38/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0 |
| 39/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 0 |
| 4/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0 |
| 4/Pid.C/2021/PN Pps | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 |
| 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 |
| 40/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0 |
| 41/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 0 |
| 42/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 0 |
| 43/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 0 |
| 44/Pid.B/LH/2021/PN Pps | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 0 |
| 45/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 0 |
| 46/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 |
| 47/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0 |
| 48/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 0 |
| 49/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 0 |
| 5/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0 |
| 5/Pid.C/2021/PN Pps | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 |
| 50/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0 |
| 51/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 0 |
| 52/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 |
| 53/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 0 |
| 54/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-08 | 2021-09-09 | -1 |
| 55/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0 |
| 56/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0 |
| 57/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 0 |
| 58/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 0 |
| 59/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0 |
| 6/Pid.C/2021/PN Pps | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 |
| 6/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 0 |
| 60/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0 |
| 61/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0 |
| 62/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0 |
| 63/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0 |
| 64/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0 |
| 65/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0 |
| 66/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0 |
| 67/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0 |
| 68/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0 |
| 69/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 0 |
| 7/Pid.C/2021/PN Pps | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 |
| 7/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0 |
| 70/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0 |
| 71/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 0 |
| 72/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 0 |
| 73/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 0 |
| 74/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 0 |
| 75/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 |
| 76/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 |
| 77/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0 |
| 78/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0 |
| 79/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0 |
| 8/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 0 |
| 81/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0 |

| | | | |
|------------------------|------------|------------|---|
| 82/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 |
| 83/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 |
| 84/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 |
| 88/Pid.B/2020/PN Pps | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 |
| 9/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 0 |
| 93/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 |
| 94/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 |
| 95/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0 |
| 96/Pid.B/2020/PN Pps | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0 |
| 97/Pid.B/2020/PN Pps | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0 |
| 98/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0 |
| 99/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0 |

Dari 103 Perkara Pidana yang ditangani selama tahun 2021 semua perkara dilaksanakan *one days minutes*.

Nilai Index ini dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Terlambat Pemberitahuan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Yang ditangani}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{103}{103} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 96% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 104.16 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100 \%}{96 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 104.17 \%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta register perkara.

c) **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Jumlah Perkara Perdata yang putus selama tahun 2021 berjumlah 42 Perkara Perdata.

Dari 42 Perkara Perdata tersebut, yang dilaksanakan mediasi selama tahun 2021 berjumlah 14 Perkara, sedangkan dari 14 perkara tersebut 1 perkara berhasil di

mediasi, 13 perkara gagal melaksanakan mediasi dan 1 perkara tidak dapat dilaksanakan.

Sehingga Nilai Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Perkara Perdata Yang Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Putus Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{1}{42} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 2,38 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 2,38%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 2 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 119 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{2,38 \%}{2 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 119 \%$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

d) Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara yang menyatakan Banding selama tahun 2020 berjumlah 14Perkara, yang sebarannya adalah sebagai berikut:

| Triwulan | Jumlah Perkara Diputus | Mengajukan Banding | Tidak mengajukan banding |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 39 | 4 | 35 |
| 2 | 29 | 3 | 26 |
| 3 | 36 | 6 | 30 |
| 4 | 41 | 3 | 38 |
| Jumlah | 145 | 16 | 129 |

Perkara tersebut terdiri dari 2 Perkara Perdata dan 14 Perkara Pidana. Pengiriman Berkas dianggap tepat dan lengkap jika tenggang waktu Pengiriman adalah 14 Hari sejak para pihak menyatakan Banding pada perkara Pidana dan 30 hari pada Perkara Perdata. Analisis ini diuraikan sebagai berikut:

| Nomor Perkara | Tanggal Permohonan Banding | Tanggal Pengiriman Berkas | Rentang Waktu | Keterangan |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 95/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-15 | 2021-01-28 | 13 | Tepat Waktu |
| 99/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-15 | 2021-01-28 | 13 | Tepat Waktu |
| 3/Pid.B/LH/2021/PN Pps | 2021-02-09 | 2021-02-22 | 13 | Tepat Waktu |
| 14/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 11 | Tepat Waktu |
| 16/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 11 | Tepat Waktu |
| 28/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 14 | Tepat Waktu |
| 31/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-06-25 | 2021-07-08 | 13 | Tepat Waktu |
| 36/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 12 | Tepat Waktu |
| 38/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-07-02 | 2021-07-14 | 12 | Tepat Waktu |
| 9/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-07-27 | 2021-08-24 | 28 | Tepat Waktu |
| 41/Pid.B/2021/PN Pps | 2021-07-08 | 2021-07-21 | 13 | Tepat Waktu |
| 51/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 12 | Tepat Waktu |
| 60/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 12 | Tepat Waktu |
| 19/Pdt.G/2021/PN Pps | 2021-11-25 | 2021-12-14 | 19 | Tepat Waktu |
| 73/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-10-28 | 2021-11-09 | 12 | Tepat Waktu |
| 75/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-11-25 | 2021-12-06 | 11 | Tepat Waktu |

Perkara yang menyatakan Kasasi selama tahun 2021 berjumlah 6 Perkara, yang merupakan perkara Pidana. Pengiriman Berkas dianggap tepat dan lengkap jika tenggang waktu Pengiriman adalah 30 Hari sejak para pihak menyatakan Banding pada untuk perkara Pidana. Analisis ini diuraikan sebagai berikut:

| Nomor Perkara | Tanggal Permohonan Kasasi | Tanggal Pengiriman Berkas | Rentang Waktu | Keterangan |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 82/Pid.Sus/2020/PN Pps | 2021-01-27 | 2021-02-24 | 28 | Tepat Waktu |
| 3/Pid.B/LH/2021/PN Pps | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 27 | Tepat Waktu |
| 28/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-08-24 | 2021-09-13 | 20 | Tepat Waktu |
| 51/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-10-26 | 2021-11-23 | 28 | Tepat Waktu |
| 60/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 13 | Tepat Waktu |
| 75/Pid.Sus/2021/PN Pps | 2021-12-27 | 2022-01-06 | 10 | Tepat Waktu |

Untuk Perkara PK selama tahun 2021 adalah Nihil.

Untuk indikator Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu ditetapkan target sebesar 95%. Perhitungan Indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Indikator} &= \frac{\text{Jumlah Perkara yang dikirim tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\% \\ \text{Persentase Indikator} &= \frac{22}{22} \times 100\% \\ \text{Persentase Indikator} &= 100\% \end{aligned}$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 95 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 95 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indikator} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Nilai Indikator} &= \frac{100\%}{95\%} \times 100\% \\ \text{Nilai Indikator} &= 105.26\% \end{aligned}$$

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

e) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Untuk indikator persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus ditetapkan target sebesar 90 % dan realisasinya mencapai 100%, hal ini dikarenakan selama tahun 2021 tidak ada Perkara yang dianggap cukup menarik perhatian pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan, Laporan tahunan dan SIPP.

3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Dalam sasaran Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

- 1). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- 2). Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;

3). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum);

Pada Tahun 2021 Realisasi pencapaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|---|--|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7% | 50% | 714.29 % |

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Posbakum (Pos bantuan Hukum) adalah salah satu program unggulan Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses peradilan pada masyarakat.

Di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pelaksanaan posbakum bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum PERADI.

Untuk tahun 2021 dalam indikator kinerja ini ditetapkan target 7% dan dalam realisasinya terdapat 1 perkara dari 2 perkara yang diberikan layanan selama tahun 2021 sehingga persentasenya diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Layanan Posbakum yang terdaftar menjadi perkara}}{\textit{Jumlah layanan posbakum selama tahun 2021}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{1}{2} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 50 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 50%, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 7 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 95 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{50\%}{7\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 714.29\%$$

Sumber Laporan Kepaniteraan Hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Dalam sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama yakni persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE |
|-----|--|---|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100% | 111.11% |

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan target 90% dan realisasinya mencapai 100%.

5. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Dalam sasaran terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau terdiri atas 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase pengawasan keuangan perkara
2. Persentase pengawasan keuangan DIPA
3. Persentase pengawasan bidang administrasi umum
4. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis
5. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum
6. Persentase realisasi PNBP
7. Persentase realisasi anggaran belanja

Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSEN TASE |
|-----|---|---|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 4 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau | Persentase pengawasan keuangan perkara | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase pengawasan keuangan DIPA | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase pengawasan bidang administrasi umum | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis | 10% | 38,09% | 380,9% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum | 10% | 28,57% | 285,7% |
| | | Persentase realisasi PNBPN | 50% | 159,71% | 319,41% |
| | | Persentase realisasi anggaran belanja | 90% | 98,01% | 108,9% |

a. Persentase pengawasan keuangan perkara

Untuk indikator persentase Pengawasan Keuangan Perkara adalah dengan membandingkan Jumlah Pengawasan Bulanan Keuangan Perkara yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan perkara.

Jumlah Pengawasan Keuangan Perkara dilakukan selama 12 kali dalam setahun dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan Perkara.

Sehingga Indikator Diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Pengawasan Keuangan Perkara}}{12} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 100 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100.00 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 90 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 111,11 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = \frac{100 \ %}{90 \ %} \times 100\%$$

$$\textit{Nilai Indikator} = 111,11 \ %$$

b. Persentase pengawasan keuangan DIPA

Untuk indikator persentase Pengawasan Keuangan DIPA adalah dengan membandingkan Jumlah Pengawasan Bulanan Keuangan DIPA yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan DIPA.

Jumlah Pengawasan Keuangan Perkara dilakukan selama 12 kali dalam setahun di semua DIPA dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan DIPA.

Sehingga Indikator Diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA}}{12} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\textit{Persentase Indikator} = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$\textit{Persentase Indikator} = 100 \ %$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100.00 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 90 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 111,11 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 111,11\%$$

c. Persentase pengawasan bidang administrasi umum

Untuk indikator persentase Pengawasan Bidang Administrasi umum adalah dengan membandingkan Jumlah Pengawasan Bulanan terhadap Administrasi umum di tiap Sub Bagian dan Kapaniteraan yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengawasan Bulanan.

Jumlah Pengawasan yang dilakukan setiap tahun berjumlah 12 kali dalam setahun hal ini dibuktikan dengan Laporan Pengawasan Bulanan Tiap Hakim Pengawas.

Sehingga Indikator Diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{Pengawasan Administrasi Umum}}{12} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 100\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 100.00 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 90 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 111,11 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 111,11\%$$

d. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis

Untuk indikator persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis adalah dengan membandingkan SDM bagian Teknis yang mengikuti Pelatihan Teknis terhadap jumlah SDM di bagian teknis.

Selama Tahun 2021, terdapat 13 Pelatihan teknis, yang dilaksanakan oleh 8 SDM yang diuraikan sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Diklat yang Diikuti |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. | Ketua | Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Peradilan Umum Angkatan XXI. |
| 2. | Niken Anggi Prajanti, S.H. | Hakim | Pelatihan Online Teknik Menyusun resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) batch 7 s.d 8 Tahun 2021. |
| 3. | Dian Nur Pratiwi., S.H., M.H.Li | Wakil Ketua | Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Gelombang 3 Seluruh Indonesia. |
| 4. | Dian Nur Pratiwi., S.H., M.H.Li | Wakil Ketua | Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Narkotika Bagi Hakim Peradilan Umum dan Militer Seluruh Indonesia. |
| 5. | Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H. | Hakim | Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) 1 Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia. |
| 6. | Dian Nur Pratiwi., S.H., M.H.Li | Wakil Ketua | Training of Trainers (TOT) Reguler. |
| 7. | Ruspeliati, S.H. | Panitera | Pelatihan Bimbingan Teknis Kepanitraan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya. |
| 8. | Dede Andreas, S.H., M.H. | Panitera Muda Perdata | Pelatihan Bimbingan Teknis Kepanitraan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya. |
| 9. | Noorhayati, S.kom., S.H. | Panitera Muda Pidana | Pelatihan Bimbingan Teknis Kepanitraan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya. |
| 10. | Dian Nur Pratiwi., S.H., M.H.Li | Wakil Ketua | Pelatih Lanjutan Hak Asasi Manusia bagi Peradilan Umum Seluruh Indonesia. |
| 11. | Dian Nur Pratiwi., S.H., M.H.Li | Wakil Ketua | Sosialisasi PERMA 3 Tahun 2017 dan PERMA 5 Tahun 2019. |
| 12. | Ismaya Salindri, S.H., M.H. | Hakim | Sosialisasi PERMA 5 Tahun 2019 |
| 13. | Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. | Hakim | Sosialisasi PERMA 5 Tahun 2019 |

Sedangkan Jumlah SDM di Pengadilan Negeri Pulang Pisau berjumlah 21 orang yang diuraikan sebagai berikut:

| No | N a m a | N I P | Jabatan |
|----|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. | 197701122001122001 | Ketua Pengadilan |
| 2 | Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li | 198101082003122001 | Wakil Ketua Pengadilan |
| 3 | Ismaya Salindri, S.H., M.H. | 199105012017122002 | Hakim Tingkat Pertama |
| 4 | Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H. | 199201042017121003 | Hakim Tingkat Pertama |
| 5 | Ishmatul Lu`Lu, S.H. | 199312132017122001 | Hakim Tingkat Pertama |
| 6 | Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. | 199402102017122002 | Hakim Tingkat Pertama |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 7 | Silvia Kumalasari, S.H. | 199408162017122002 | Hakim Tingkat Pertama |
| 8 | Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. | 198910082017122001 | Hakim Tingkat Pertama |
| 9 | Ruspeliati, S.H. | 196904011991032002 | Panitera Tingkat Pertama |
| 10 | I Made Landep, SH | 197210041993031006 | Sekretaris |
| 11 | Lelo Herawan, S.H. | 198501142009041003 | Panitera Muda |
| 12 | Dede Andreas, S.H., M.H. | 198202122005021003 | Panitera Muda |
| 13 | Noorhayati, S.Kom., S.H. | 197708092009122002 | Panitera Muda |
| 14 | Samsul Rizal, S.H. | 198404042006041004 | Kepala Sub Bagian |
| 15 | Laili Rahmah, A.Md. S.H. | 198012242009122005 | Kepala Sub Bagian |
| 16 | Janward Sumuang Purba | 197901102001121001 | Juru Sita |
| 17 | Reinhard Simanjuntak, S.H. | 199408202019031005 | Analisis SDM Aparatur |
| 18 | M. Zaldi Akbar, S.H. | 199410122019031006 | Analisis Perkara Peradilan |
| 19 | Riviera Jesica Manurung, S.H. | 199402082020122008 | Analisis Perkara Peradilan |
| 20 | Arofah Azhar, A.Md. | 198903242020121002 | Pengelola Sistem dan Jaringan |
| 21 | Romi Nevriyandra, A.Md. | 198907262020121002 | Pengadministrasi Registrasi Perkara |

Sehingga Indikator Diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Indikator} \\ & = \frac{\text{SDM Yang Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah SDM}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{8}{21} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 38,09 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 38.09 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 10 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 380,95 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{38,09 \%}{10 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 380,95\%$$

e. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administasi umum

Untuk indikator persentase SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum adalah dengan membandingkan SDM bagian administrasi umum yang mengikuti Pelatihan administrasi umum terhadap jumlah SDM di bagian administrasi umum Selama Tahun 2021, terdapat 17 Pelatihan Administrasi Umum, yang dilaksanakan oleh 6 SDM yang diuraikan sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Diklat yang Diikuti |
|-----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Laili Rahmah, A.Md., S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | Pelatihan Online Basic User Experience Design Tahun 2021. |
| 2. | Laili Rahmah, A.Md.,S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | Pelatihan Online Manajemen Aset Gelombang I Tahun2021 |
| 3. | Reviera Jesica Manurung, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi Calon Pegawai Negeri (CPNS) Tahun 2021. |
| 4. | Arofah Azhar, A.Md. | Pengelola Sistem dan jaringan | Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi Calon Pegawai Negeri (CPNS) Tahun 2021. |
| 5. | Romi Nevriyandra, A.Md. | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi Calon Pegawai Negeri (CPNS) Tahun 2021. |
| 6. | I Made Landep, S.H. | Sekretaris | Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKP Gelombang I Batch A s.d II C Tahun 2021. |
| 7. | Reviera Jesica Manurung, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang I Golongan III Angkatan I s.d XII Tahun 2021. |
| 8. | Laili Rahmah, A.Md., S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | Pelatihan Online English Effective Presentation Bagi Peserta PKP Gelombang I Angkatan XVII s.d XXV dari Tempat Tugas Tahun 2021. |
| 9. | Laili Rahmah, A.Md., S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | Pelatihan E-Learning Penyusunan laporan Kinerja Gelombang 3 Angkatan XIII s.d XVII dari Tempat Tugas Tahun 2021 |
| 10. | Reviera Jesica Manurung, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | Pelatihan Online English Effective Presentation Bagi Peserta Lastar Calon PNS Golongan III Gelombang I dari Tempat Tugas Tahun 2021 |
| 11. | Arofah Azhar, A.Md | Pengelola Sistem dan Jaringan | Latsar Calon Pegawai Sipil (CPNS) Distance Learning |

| | | | |
|-----|---------------------------|--|--|
| | | | Melalui E-Learning Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d XII Tahun 2021 dari Tempat Tugas. |
| 12. | Romi Nevriyandra, A.Md | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Latsar Calon Pegawai Sipil (CPNS) Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d XII Tahun 2021 dari Tempat Tugas. |
| 13. | Laili Rahmah, A.Md.,S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | Pelatihan Online Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan VI Tahun 2021. |
| 14. | I Made Landep, S.H. | Sekretaris | Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Pengelola Kepegawaian Tahun 2021 |
| 15. | Laili Rahmah, A.Md., S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Pengelola Kepegawaian Tahun 2021 |
| 16. | I Made Landep, S.H. | Sekretaris | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2021 |
| 17. | Samsul Rizal, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2021 |

Sedangkan Jumlah Tenaga Teknis di Pengadilan Negeri Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut:

| No | N a m a | N I P | Jabatan |
|----|--|--------------------|--------------------------|
| 1 | Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. | 197701122001122001 | Ketua Pengadilan |
| 2 | Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li | 198101082003122001 | Wakil Ketua Pengadilan |
| 3 | Ismaya Salindri, S.H., M.H. | 199105012017122002 | Hakim Tingkat Pertama |
| 4 | Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. | 199201042017121003 | Hakim Tingkat Pertama |
| 5 | Ishmatul Lu`Lu, S.H. | 199312132017122001 | Hakim Tingkat Pertama |
| 6 | Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. | 199402102017122002 | Hakim Tingkat Pertama |
| 7 | Silvia Kumalasari, S.H. | 199408162017122002 | Hakim Tingkat Pertama |
| 8 | Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. | 198910082017122001 | Hakim Tingkat Pertama |
| 9 | Ruspeliati, S.H. | 196904011991032002 | Panitera Tingkat Pertama |
| 10 | I Made Landep, SH | 197210041993031006 | Sekretaris |
| 11 | Lelo Herawan, S.H. | 198501142009041003 | Panitera Muda |
| 12 | Dede Andreas, S.H., M.H. | 198202122005021003 | Panitera Muda |

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 13 | Noorhayati, S.Kom., S.H. | 197708092009122002 | Panitera Muda |
| 14 | Samsul Rizal, S.H. | 198404042006041004 | Kepala Sub Bagian |
| 15 | Laili Rahmah, A.Md. S.H. | 198012242009122005 | Kepala Sub Bagian |
| 16 | Janward Sumuang Purba | 197901102001121001 | Juru Sita |
| 17 | Reinhard Simanjuntak, S.H. | 199408202019031005 | Analisis SDM Aparatur |
| 18 | M. Zaldi Akbar, S.H. | 199410122019031006 | Analisis Perkara Peradilan |
| 19 | Riviera Jesica Manurung, S.H. | 199402082020122008 | Analisis Perkara Peradilan |
| 20 | Arofah Azhar, A.Md. | 198903242020121002 | Pengelola Sistem dan Jaringan |
| 21 | Romi Nevriyandra, A.Md. | 198907262020121002 | Pengadministrasi Registrasi Perkara |

Sehingga Indikator Diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{SDM Yang Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah SDM}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{6}{21} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 28,57 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 28,57 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 10 % sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 285,7 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{28,57 \%}{10 \%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 285,7\%$$

f. Persentase realisasi PNB

Untuk indikator persentase realisasi PNB adalah dengan membandingkan realisasi PNB dibandingkan dengan target PNB tahunan.

Realisasi PNB diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran, Sedangkan Target PNB berasal dari target PNB Tahunan dari aplikasi SAKTI.

| Kode | Uraian | Perpajakan | Umum | Fungsional | O |
|-----------|--|------------|------|------------|---|
| 005.03.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 0 | 0 | 5.290.000 | |
| 1052 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum | 0 | 0 | 5.290.000 | |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 0 | 0 | 880.000 | |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 0 | 0 | 4.410.000 | |

Target PNBPN Tahun 2021 adalah 5.290.000 yang terdiri dari 2 Jenis Pendapatan, yaitu:

- Akun Pendapatan Ongkos Perkara : Rp. 880.000
- Akun Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya :Rp. 4.410.000

Realisasi PNBPN TA 2021 adalah berjumlah 7.043.000 sebagaimana laporan Pendapatan dari OM SPAN KEMENKEU.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan: 01 s.d. 12

| NO | Kode Akun Jenis Pendapatan | Setoran | | | | Potongan SPM | Pengembalian | Realisasi |
|--------------------|---|----------|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| | | MPN | | BI | | | | |
| | | Pajak | Non Pajak | Pajak | Non Pajak | | | |
| 1 | 425233 Pendapatan Ongkos Perkara | 0 | 1,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510,000 |
| 2 | 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 0 | 5,533,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,533,000 |
| GRAND TOTAL | | 0 | 7,043,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,043,000 |

Sehingga Indikator Realisasi PNBPN Diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Realisasi PNBPN}}{\text{Target Estimasi PNBPN}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{7.043.000}{4.410.000} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Indikator} = 159.71 \%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 159.71 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 50 % sehingga jika dipersentasikan, maka nilai Indikator ini adalah 319,41 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{159.71\%}{50\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 319,41\%$$

g. Persentase realisasi anggaran belanja

Untuk indikator persentase realisasi anggaran belanja adalah dengan membandingkan antara realisasi dengan pagu anggaran tahunan.

Adapun Realisasi Anggaran tahun 2021 baik DIPA BUA maupun DIPA BADILUM adalah sebagai berikut:

DIPA BUA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

| No | BA-Satker | Nama Satker | KPPN | Ket | Jenis Belanja | | | | | | | | Total | | | |
|----|------------|--------------------------------|------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | | Pegawai | Barang | Modal | Beban Bunga | Subsidi | Hibah | Bansos | Lain-lain | | Transfer | | |
| 1 | 005-401920 | PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU | 043 | PAGU | 3,036,114,000 | 987,023,000 | 23,887,455,000 | | | | | | | | 27,910,592,000 | |
| | | | | REALISASI | 2,576,839,414 | 985,599,311 | 23,886,342,896 | | | | | | | | | 27,448,781,621 |
| | | | | PERSENTASE | (84.87%) | (99.86%) | (100.00%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | (98.35%) |
| | | | | SISA | 459,274,586 | 1,423,689 | 1,112,104 | | | | | | | 461,810,379 | | |
| | | | | TOTAL | PAGU | 3,036,114,000 | 987,023,000 | 23,887,455,000 | | | | | | | 27,910,592,000 | |
| | | | | | REALISASI | 2,576,839,414 | 985,599,311 | 23,886,342,896 | | | | | | | 27,448,781,621 | |
| | | | | | PERSENTASE | (84.87%) | (99.86%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (98.35%) | |
| | | | | | SISA | 459,274,586 | 1,423,689 | 1,112,104 | | | | | | | 461,810,379 | |

DIPA BADILUM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

| No | BA-Satker | Nama Satker | KPPN | Ket | Jenis Belanja | | | | | | | | Total | | | |
|----|------------|--------------------------------|------|------------|---------------|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| | | | | | Pegawai | Barang | Modal | Beban Bunga | Subsidi | Hibah | Bansos | Lain-lain | | Transfer | | |
| 1 | 005-402026 | PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU | 043 | PAGU | 0 | 78,945,000 | 0 | | | | | | | | 78,945,000 | |
| | | | | REALISASI | 0 | 77,099,300 | 0 | | | | | | | | | 77,099,300 |
| | | | | PERSENTASE | 0.00% | (97.66%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | (97.66%) |
| | | | | SISA | 0 | 1,845,700 | 0 | | | | | | | 1,845,700 | | |
| | | | | TOTAL | PAGU | 0 | 78,945,000 | 0 | | | | | | | 78,945,000 | |
| | | | | | REALISASI | 0 | 77,099,300 | 0 | | | | | | | 77,099,300 | |
| | | | | | PERSENTASE | (0.00%) | (97.66%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (97.66%) | |
| | | | | | SISA | 0 | 1,845,700 | 0 | | | | | | | 1,845,700 | |

Data ini diperoleh dari realisasi OM SPAN KEMENTERIAN Keuangan yang diperoleh secara realtime.

Sehingga dari data Realisasi anggaran tersebut diperoleh Realisasi DIPA BUA adalah 98,35% dan DIPA BADILUM adalah 97,66%. Sehingga rerata Realisasi Anggaran adalah:

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Realisasi DIPA BUA} + \text{Realisasi DIPA BADILUM}}{2}$$

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{98,35\% + 97,66\%}{2}$$

$$\text{Persentase Indikator} = 98,01\%$$

Sehingga untuk indikator ini Realisasi adalah 98,01 %, sedangkan target yang ingin dicapai pada Indikator ini adalah 90% sehingga jika dipersentasekan, maka nilai Indikator ini adalah 108,9 % sebagaimana perhitungan di bawah ini:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{98,01\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Indikator} = 108,9\%$$

A.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Realisasi Tahun sebelumnya.

Dalam menghitung perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (2020) digunakanlah indikator kinerja utama tahun sebelumnya, yang mana hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Tahun Anggaran : 2021 dan 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Tahun 2021 | | | Tahun 2020 | | |
|-----|--|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase | 96 % | 100 % | 104,17% | 95% | 67,57% | 71.13% |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------|----------|----------|-----|--------|---------|
| | | Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | | | | | | |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17% | 95% | 100% | 105,26% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % | 88,96% | 126.24 % | 70% | 89.63% | 128.04% |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % | 95,86 % | 119,82 % | 80% | 95.55% | 119.44% |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % | 100,00 % | 111,11 % | 90% | 100% | 111.11% |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % | 25 % | 1250 % | 2% | 0% | 0% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % | 98.01% | 122.51% | 70% | 83.19% | 118.84% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % | 95% | 97.3% | 102.42% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % | 95% | 97.96% | 103.11% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan | 2 % | 2,38% | 119,00% | 2% | 5.41% | 270.50% |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------|------|----------|-----|------|---------|
| | | Melalui Mediasi | | | | | | |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % | 100% | 105,26% | 95% | 95% | 100.00% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111.11% |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 7% | 50% | 714.29 % | 5% | 0% | 0% |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111.11% | 90% | 100% | 111,11% |

Dari gambaran pencapaian diatas dapat dilihat bahwa secara umum terdapat peningkatan realisasi kinerja pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 walaupun ada beberapa indikator yang menurun.

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari segi Kuantitas maupun Kualitasnya. Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | Tahun 2021 | | Tahun 2020 | | PERSEN-TASE |
|-----|--|---|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | | REALI-SASI | PERSEN-TASE | TAR-GET | REALI-SASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17% | 95% | 67.57% | 71.13% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17% | 95% | 100% | 105,26% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % | 88,96% | 126.24 % | 70% | 89.63% | 128.04% |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % | 95,86 % | 119,82 % | 80% | 95.55% | 119.44% |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % | 100,00 % | 111,11 % | 90% | 100% | 111.11% |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % | 25 % | 1250 % | 2% | 0% | 0% |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % | 98.01% | 122.51% | 70% | 83.19% | 118.84% |

a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan baik pada Tahun 2021 sudah terealisasi 100% sesuai dengan target yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Jenis Perkara | Sisa 2019 | Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2019 pada tahun 2020 | Sisa 2020 | Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2020 pada tahun 2021 |
|--------------------|-----------|--|-----------|--|
| Perdata Permohonan | 0 | 100% | 0 | 100% |
| Perdata Gugatan | 12 | 100% | 5 | 100% |
| Jumlah | 12 | 100% | 5 | 100% |

b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan baik pada Tahun 2021 sudah terealisasi 100% sesuai dengan target yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel

| Jenis Perkara | Sisa 2019 | Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2019 pada tahun 2020 | Sisa 2020 | Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2020 pada tahun 2021 |
|---------------|-----------|--|-----------|--|
| Pidana | 4 | 100% | 9 | 100% |
| Pidana Khusus | 0 | 100% | 0 | 100% |
| Jumlah | 4 | 100% | 9 | 100% |

c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|--|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|--------|
| Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17% | 95% | 67.57% | 71.13% |

Pada tahun 2021 terdapat kenaikan Persentase Indikator Strategis Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu dari 71.13% menjadi 104.17% selama tahun 2020 atau sekitar 67.22%

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|--|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17% | 95% | 100% | 105,26% |

Pada tahun 2021 terdapat penurunan Persentase Indikator Strategis Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu dari 105.26% menjadi 104.17% selama tahun 2021 atau turun sekitar 1.09 %

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|--|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71% | 88,96% | 126.24 % | 70% | 89.63% | 128.04% |

Pada tahun 2021 terdapat penurunan Persentase Indikator Strategis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari 128.04% menjadi 126.24% selama tahun 2021 atau turun sekitar 1.8%

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|---|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % | 95,86 % | 119,82 % | 80% | 95.55% | 119.44% |

Pada tahun 2021 terdapat kenaikan Persentase Indikator Strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dari 119.44 menjadi 119,82 % selama tahun 2021 atau naik sekitar 0.38 %.

g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|---|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali | 90 % | 100,00 % | 111,11 % | 90% | 100% | 111.11% |

Pada tahun 2021 maupun 2020 tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|---|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % | 25 % | 1250 % | 2% | 0% | 0% |

Pada tahun 2021 terdapat kenaikan Persentase Indikator h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dari 0% menjadi 1250% selama tahun 2021 atau naik sekitar 1250%.

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|---------|
| Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % | 98.01% | 122.51% | 70% | 83.19% | 118.84% |

Pada tahun 2020 terdapat Kenaikan Index Kepuasan Pencari Keadilan dari 118.84% menjadi 122.51% selama tahun 2021 atau naik sekitar 3.67 % hal ini disebabkan Survey Kepuasan Pencari Keadilan semakin baik.

2. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | Tahun 2021 | | Tahun 2020 | | PERSEN-TASE |
|-----|--|---|---------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | REALI-SASI | PERSEN-TASE | REALI-SASI | PERSEN-TASE | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % | 95% | 97.3% | 102.42% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara | 96 % | 100 % | 104,17 % | 95% | 97.96% | 103.11% |

| | | | | | | |
|--|------|-------|---------|-----|-------|---------|
| Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | | | | | | |
| Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % | 2,38% | 119,00% | 2% | 5.41% | 270.50% |
| Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % | 100% | 105,26% | 95% | 95% | 100.00% |
| Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111.11% |

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|---|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % | 95% | 97.3% | 102.42% |

Pada tahun 2021 terdapat Kenaikan Indikator Strategis Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dari 102.42% menjadi 104,17 % atau mengalami kenaikan sebesar 1.75%.

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Salinan Putusan Perkara | 96 % | 100 % | 104,17 % | 95% | 97.96% | 103.11% |

Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Pada tahun 2021 terdapat Kenaikan Indikator Strategis Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dari 103.11% menjadi 104,17 % atau mengalami kenaikan sebesar 1.06%

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|--|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % | 2,38% | 119,00% | 2% | 5.41% | 270.50% |

Pada tahun 2021 terdapat Penurunan Indikator c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dari 270.50% menjadi 119,00% atau mengalami penurunan sebesar 151.5%

d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Pada tahun 2021 terdapat Kenaikan Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu dari 101.00 % menjadi 105,26% selama tahun 2021 atau sekitar 5.26% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|--|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % | 100% | 105,26% | 95% | 95% | 100.00% |

e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|---|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|---------|
| Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian | 90 % | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111.11% |

Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Selama tahun 2021 maupun 2020 tidak ada satupun perkara yang menarik perhatian masyarakat. Sehingga untuk indikator Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus adalah 100%

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | Tahun 2021 | | Tahun 2020 | | PERSEN-TASE |
|-----|---|--|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | | REALI-SASI | PERSEN-TASE | TAR-GET | REALI-SASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7% | 50% | 714.29 % | 5% | 0% | 0% |

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|--|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|--------|
| Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7% | 50% | 714.29 % | 5% | 0% | 0% |

Posbakum (Pos bantuan Hukum) adalah salah satu program unggulan Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses peradilan pada masyarakat. Pengadilan Negeri

Pulang Pisau dalam pelaksanaan posbakum bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum PERADI pada tahun 2021 dalam indikator kinerja ini ditetapkan target 5% dan dalam realisasinya ada satu perkara yang didaftarkan yang merupakan hasil Konsultasi.

4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAR-GET | REALI-SASI | PERSEN-TASE | Tahun 2021 | | Tahun 2020 | |
|----|--|--|---------|------------|-------------|------------|------|------------|-----|
| | | | | | | (4) | (5) | (4) | (5) |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111,11% | |

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

| Indikator Strategis | Target 2021 | Realisasi 2021 | % 2021 | Target 2020 | Realisasi 2020 | % 2020 |
|--|-------------|----------------|---------|-------------|----------------|---------|
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111,11% | 90% | 100% | 111,11% |

Untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan target 90% dan realisasinya mencapai 100%, dimana sepanjang tahun 2021 ada 1 perkara yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Sedangkan Tahun 2020 belum ada Perkara yang dieksekusi.

A.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA 2020-2024

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Pulang Pisau juga telah menyusun Rencana Strategis PN Pulang Pisau 2020-

2024(Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras.

Dalam Renstra PN Pulang Pisau 2020-2024 telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan terget jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2021 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2020-2024 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 | REALISASI 2021 |
|-----|--|---|----------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % | 100 % |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % | 100 % |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % | 88,96% |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % | 95,86 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % | 100,00 % |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % | 25 % |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % | |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % | 100 % |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % | 100 % |

| | | | | |
|---|---|--|------|-------|
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % | 2,38% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % | 100% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % | 100% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7% | 50% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100% |

Dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2021 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir Rencana Program jangka Menengah yang berakhir pada tahun 2021 nampak bahwa pencapaian Pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup memuaskan, dan optimis pada tahun 2021 semua indikator kinerja yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan dan memenuhi semua target yang telah ditetapkan.

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Realisasi kinerja 2021

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2021 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana yang ada di PN Pulang Pisau.

Dimana rata-rata setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan melampaui target.

Namun masih ada beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target Penetapan Kinerja di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Hal tersebut diantaranya adalah :

- Pengelolaan Tertib administrasi perkara yang tidak dapat dilakukan tepat waktu mengingat SDM yang ada sangat masih minim dari segi jumlah. Karena sangat kurangnya staf di bagian Kepaniteraan, sehingga output yang ingin dicapai kurang optimal. Hal ini tergambar pada beberapa indikator yang memiliki persentase kurang dari 100% seperti Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat

Waktu, Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu, Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu.

- Keadaan lapangan tidak mendukung untuk memperoleh nilai yang maksimal. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dan Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tidak memperoleh hasil yang maksimal dikarenakan faktor eksternal misalkan para pihak atau perkara yang masuk tidak mendukung untuk memperoleh nilai indikator yang maksimal.

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber daya Dana maupun sumber daya Manusia.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat anggaran belanja Rp. 27,910,592,000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) DIPA Badan Urusan Administrasi dan Rp. 78,945,000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) DIPA Badan Peradilan Umum dengan tingkat penyerapan anggaran 98.34 % untuk DIPA BUA dan 97.66% untuk DIPA Badan Peradilan Umum

Penyerapan anggaran ini sudah mencapai persentase relative baik, dan semua program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Uraian lebih rinci mengenai efisiensi anggaran akan diuraikan pada bagian Realisasi Anggaran.

Efisiensi atas penggunaan SDM pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau juga sudah dilaksanakan sebaik mungkin, dengan tenaga yang sangat minimal.

Namun ditengah keterbatasan jumlah SDM tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau tetap berkomitmen dan berusaha maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, serta terus meningkatkan kinerjanya.

A.6. Analisis atas program kerja/kegiatan yang mendukung keberhasilan /kegagalan pencapaian target kinerja 2021

Program kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2021 telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dalam program kerja tersebut

sudah tertuang kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2021 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing insidental bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindak lanjuti rekomendasinya oleh Pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh Pimpinan sesuai Petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV.

Hasilnya adalah dalam audit akreditasi penjaminan mutu (Indonesia court performance-Excelent) yang dilakukan oleh tim audit TAPM PN Pulang Pisau menerima Sertifikat Akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum nomor: TAPM.357/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 dengan nilai A.

Demikian juga dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang laporannya diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri seharusnya laporan tersebut dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian. Namun saat ini LHP tersebut hanya bersifat memotret permukaan saja tanpa menggali masalah-masalah yang sebenarnya ada untuk dianalisis sehingga menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan mengarah pada perbaikan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebesar Rp 27,989,537,000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari 2 unit organisasi yaitu :

DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 27,910,592,000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA 03 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 78,945,000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Adapun Realisasi anggaran tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| DIPA 01 | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai (51) | 3,036,114,000 | 2,576,839,414 | 84.87% |
| 2 | Belanja Barang (52) | 987,023,000 | 985,599,311 | 99.86% |
| 3 | Belanja Modal (53) | 23,887,455,000 | 23,886,342,896 | 100.00% |
| JUMLAH I | | 27,910,592,000 | 27,448,781,621 | 98.34% |
| DIPA 03 | | | | |
| 1 | Belanja Barang (52) | 78,945,000 | 77,099,300 | 97.66% |
| JUMLAH II | | 78,945,000 | 77,099,300 | 97.66% |
| JUMLAH TOTAL I + II | | 27,989,537,000 | 27,525,880,921 | 98.34% |

Rekapitulasi Realisasi anggaran tahun 2021 adalah :

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Anggaran | : Rp 27,989,537,000,- |
| Realisasi | : Rp 27,525,880,921,- |
| Sisa anggaran | : Rp 463,656,079,- |
| Persentase Pencapaian | : 98.34% |

Adapun rincian realisasi anggaran di setiap program layanan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01)

Jumlah Anggaran : Rp 4,023,137,000,-

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Realisasi Anggaran | : Rp 3,562,438,725,- |
| Sisa Anggaran | : Rp 460,698,275,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 88.55 % |

Dengan perincian :

Belanja Pegawai

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 3,036,114,000 | 2,576,839,414 | 459,274,586 | 84.87 |

Belanja Barang

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 987,023,000 | 985,599,311 | 1,423,689 | 99.86 |

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01) :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Jumlah Anggaran | : Rp 23,887,455,000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 23,886,342,896,- |
| Sisa Anggaran | : Rp 1,112,104,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100% |

Dengan perincian :

Belanja Modal Pengadaan PC Kepaniteraan

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------|------------|------|-------------|
| 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100 |

Belanja Modal Pengadaan Printer

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|
| 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100 |

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|---------------|---------------|---------|-------------|
| 1 | 1,486,910,000 | 1,486,735,100 | 174,900 | 99,99 |

Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|----------------|----------------|---------|-------------|
| 1 | 22,371,545,000 | 22,370,607,796 | 937,204 | 99,99 |

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan (DIPA 03) :

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Jumlah Anggaran | : Rp 78,945,000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 77,099,300,- |
| Sisa Anggaran | : Rp 1,845,700,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 97.66 % |

Dengan perincian :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------|------------|------|-------------|
| 1 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 100 |

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | 54,945,000 | 53,099,300 | 1,845,700 | 96.64 |



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Pulang Pisau tahun 2021 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan disusunnya Laporan ini dapat terlihat kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Tentunya hal ini akan membawa dampak positif terhadap pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Pulang Pisau tahun 2021 diramu dalam pencapaian kinerja pada 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Reviu ke-3 Renstra Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2020-2024 sebelumnya. Namun selain itu untuk membandingkan hasil realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan tahun 2016 masih digunakan indikator kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis pada Reviu Renstra 2020-2024 sebelumnya

Pada umumnya secara keseluruhan pencapaian kinerja PN Pulang Pisau pada tahun 2021 telah menunjukkan kinerja yang baik ditengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Hampir semua sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik, dan pada Indikator pencapaian 0% adalah karena tidak adanya data yang terekam (tidak ada perkara prodeo dan *zitting plaats* yang terdaftar pada PN Pulang Pisau).

Hasil Pencapaian Kinerja yang telah diuraikan diatas baik keberhasilan maupun kegagalannya harus membuat PN Pulang Pisau lebih meningkatkan performanya dalam langkah mewujudkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Yang Agung”**

B. SARAN

Berdasarkan hasil-hasil pencapaian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini didapat beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu :

1. Diperlukannya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai sarana kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja suatu organisasi ;
2. LKjIP sebagai hasil akhir dari Implementasi SAKIP kiranya dapat dioptimalkan sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi yang bersangkutan ;

3. Diperlukan Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP ini agar Kinerja yang diukur dapat mengaggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadi feedback untuk menghasilkan suatu kebijakan yang mengarah pada perbaikan kinerja ;
4. Perlunya evaluasi atas LKjIP yang telah disusun dan agar disosialisasikan kepada segenap aparatur peradilan terkait agar LKjIP ini dapat bermanfaat secara optimal untuk terwujudnya pelayanan prima di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;
5. Diperlukan feedback dari Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari Supervisi terhadap LKjIP yang telah disusun agar LKjIP ini dapat menjadi Pedoman dalam peningkatan kinerja organisasi itu sendiri.



LAMPIRAN





PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/30/KPN/OT.01/SK/2/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP,
REVIU RENCANA STRATEGIS DAN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2021 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP;
2. Bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
3. Bahwa dalam rangka untuk meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu membentuk Tim untuk melakukan Reviu IKU dan menyusun LKjIP;
4. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP, REVIU RENCANA STRATEGIS DAN REVIU INDIKATOR

KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG
PISAU TAHUN 2021

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun SAKIP, Reviu Rencana Strategis dan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan penyusunan SAKIP Tahun 2021 dan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 15 Pebruari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DIAN NUR PRATIWI

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

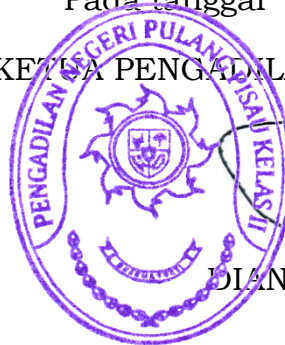
NOMOR : W16-U11/30/KPN/OT.01/SK/2/2022
TANGGAL : 15 PEBRUARI 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP, REVIU RENCANA STRATEGIS
DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2021

| No. | Nama dan NIP | Jabatan Kedinasan | Kedudukan dalam Tim Penyusun |
|-----|--|---|------------------------------|
| 1 | DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li NIP. 19720307 200003 1 003 | Ketua | Penanggung Jawab |
| 2 | SILVIA KUMALASARI, S.H. NIP. 19940816 201712 2 002 | Hakim | Pengarah Pelaksana |
| 3 | RUSPELIATI, S.H. NIP. 19690401 199103 2 002 | Panitera | Ketua Pelaksana I |
| 4 | I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006 | Sekretaris | Ketua Pelaksana II |
| 5 | SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Sekretaris |
| 6 | LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 7 | REINHARD SIMANJUNTAK, S.H., M.H. NIP. 19940820 201903 1 005 | Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Anggota |

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 15 PEBRUARI 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,




DIAN NUR PRATIWI



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

JL. Tingang Menteng No 39 Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516
Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

Pulang Pisau, 15 Perbuari 2022

Nomor : W16-U11/02/RPT.PTIP/2/2022
Perihal : - Penyusunan LKjIP Tahun 2021
- Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022
- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Lampiran : -
Kepada Yth : 1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau
4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau
5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau
6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau
7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Di –
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mohon kehadirannya untuk dapat mengikuti Rapat Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Pebruari 2022
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Agenda : - Penyusunan LKjIP Tahun 2021
- Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022
- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Tempat : Ruang Rapat

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DIAN NUR PRATIWI



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau



NOTULEN PENYUSUNAN SAKIP 2021



Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau



(0513)2027516



pnpulangpisau@gmail.com
www.pn-pulangpisau.go.id



**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI LKJIP**

| | | |
|----------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Rabu / 16 Pebruari 2022 |
| P u k u l | : | o8.00 WIB |
| Tempat | : | Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau |
| Agenda | : | Rapat Penyusunan SAKIP TA 2021 |
| Pimpinan Rapat | : | DIAN NUR PRATIWI |
| Notulis | : | Arofah Azhar |
| Peserta Rapat | : | |

RINGKASAN ACARA

1. **Pembukaan**
Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

2. **A. CAPAIAN KINERJA**

Hasil Capaian Kinerja PN Pulang Pisau Diuraikan sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|--|--|--------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % | 88,96% | 126.24 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya | 80 % | 95,86 % | 119,82 % |



| | | | | | |
|---|---|--|------|----------|----------|
| | | Hukum Kasasi | | | |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % | 100,00 % | 111,11 % |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % | 25 % | 1250 % |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % | 98.01% | 122.51% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % | 100 % | 104,17 % |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % | 2,38% | 119,00% |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % | 100% | 105,26% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % | 100% | 111,11% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7% | 50% | 714.29% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti | 90% | 100% | 111.11% |



| Putusan Pengadilan | | (Dieksekusi) | | | |
|--------------------|---|---|-----|---------|---------|
| 5 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau | Persentase pengawasan keuangan perkara | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase pengawasan keuangan DIPA | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase pengawasan bidang administrasi umum | 90% | 100% | 111,11% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis | 10% | 38,09% | 380,9% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum | 10% | 28,57% | 285,7% |
| | | Persentase realisasi PNBPNP | 50% | 159,71% | 319,41% |
| | | Persentase realisasi anggaran belanja | 90% | 98,01% | 108,9% |

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebesar Rp 27,989,537,000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari 2 unit organisasi yaitu :

DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 27,910,592,000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai program :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA 03 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 78,945,000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditujukan untuk membiayai program :



- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Adapun Realisasi anggaran tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| DIPA 01 | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai (51) | 3,036,114,000 | 2,576,839,414 | 84.87% |
| 2 | Belanja Barang (52) | 987,023,000 | 985,599,311 | 99.86% |
| 3 | Belanja Modal (53) | 23,887,455,000 | 23,886,342,896 | 100.00% |
| JUMLAH I | | 27,910,592,000 | 27,448,781,621 | 98.34% |
| DIPA 03 | | | | |
| 1 | Belanja Barang (52) | 78,945,000 | 77,099,300 | 97.66% |
| JUMLAH II | | 78,945,000 | 77,099,300 | 97.66% |
| JUMLAH TOTAL I + II | | 27,989,537,000 | 27,525,880,921 | 98.34% |

Rekapitulasi Realisasi anggaran tahun 2021 adalah :

Anggaran : Rp 27,989,537,000,-
Realisasi : Rp 27,525,880,921,-
Sisa anggaran : Rp 463,656,079,-
Persentase Pencapaian : 98.34%

Adapun rincian realisasi anggaran di setiap program layanan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01)

Jumlah Anggaran : Rp 4,023,137,000,-
Realisasi Anggaran : Rp 3,562,438,725,-
Sisa Anggaran : Rp 460,698,275,-
Persentase Realisasi Anggaran : 88.55 %



Dengan perincian :

Belanja Pegawai

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 3,036,114,000 | 2,576,839,414 | 459,274,586 | 84.87 |

Belanja Barang

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 987,023,000 | 985,599,311 | 1,423,689 | 99.86 |

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01) :

Jumlah Anggaran : Rp 23,887,455,000,-

Realisasi Anggaran : Rp 23,886,342,896,-

Sisa Anggaran : Rp 1,112,104,-

Persentase Realisasi Anggaran : 100%

Dengan perincian :

Belanja Modal Pengadaan PC Kepaniteraan

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------|------------|------|-------------|
| 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100 |

Belanja Modal Pengadaan Printer

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|-----------|-----------|------|-------------|
| 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100 |

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|---------------|---------------|---------|-------------|
| 1 | 1,486,910,000 | 1,486,735,100 | 174,900 | 99,99 |

Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor



| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|----------------|----------------|---------|-------------|
| 1 | 22,371,545,000 | 22,370,607,796 | 937,204 | 99,99 |

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan (DIPA 03) :

Jumlah Anggaran : Rp 78,945,000,-
 Realisasi Anggaran : Rp 77,099,300,-
 Sisa Anggaran : Rp 1,845,700,-
 Persentase Realisasi Anggaran : 97.66 %

Dengan perincian :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

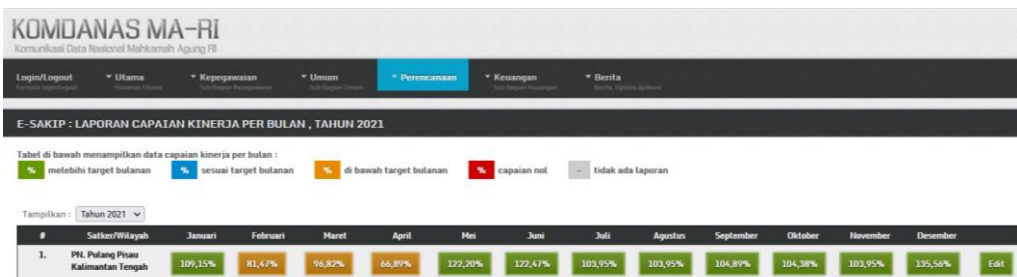
| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------|------------|------|-------------|
| 1 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 100 |

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

| No. | Anggaran | Realisasi | Sisa | % Realisasi |
|-----|------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | 54,945,000 | 53,099,300 | 1,845,700 | 96.64 |

C. CAPAIAN KINERJA BULANAN DAN TRIWULANAN

Hasil Laporan Capaian Kinerja per Bulan adalah sebagai berikut:

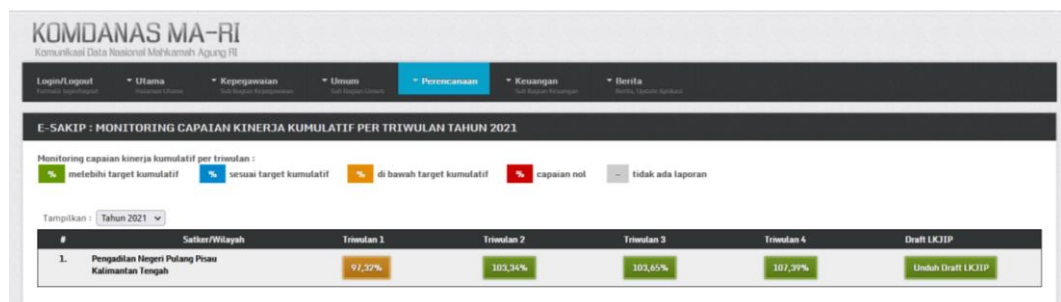


| No | Bulan | Laporan Kinerja | capaian | Keterangan |
|----|-------|-----------------|---------|------------|
|----|-------|-----------------|---------|------------|



| | | | |
|----|----------------|---------|-----------------|
| 1 | Januari 2021 | 109,15% | Sesuai target |
| 2 | Pebruari 2021 | 81,47% | Di Bawah Target |
| 3 | Maret 2021 | 96,82% | Di Bawah Target |
| 4 | April 2021 | 66,89% | Di Bawah Target |
| 5 | Mei 2021 | 122,20% | Sesuai target |
| 6 | Juni 2021 | 122,47% | Sesuai target |
| 7 | Juli 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 8 | Agustus 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 9 | September 2021 | 104,89% | Sesuai target |
| 10 | Oktober 2021 | 104,38% | Sesuai target |
| 11 | Nopember 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 12 | Desember 2021 | 135,56% | Sesuai target |

- Monitoring Capaian kinerja Kumulatif triwulan



| No | Triwulan | Laporan Kinerja | capaian | Keterangan |
|----|----------|-----------------|---------|-----------------|
| 1 | I | | 97,32% | Di Bawah Target |
| 2 | II | | 103,34% | Sesuai target |
| 3 | III | | 103,65% | Sesuai target |
| 4 | IV | | 107,39% | Sesuai target |

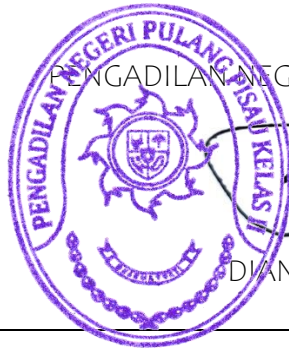


3. Dokumentasi



4 Penutup
Penyusunan SAKIP Tahun 2021 ditutup pada Pukul 11.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT



KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,


DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS


AROFAH AZHAR












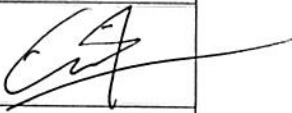




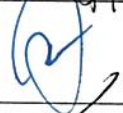



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Tingang Menteng No 39 Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516
Website : www.pn-pulangpisau.go.id. E-mail : pnpulangpisau@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Hari : RABU
Tanggal : 16 PEBRUARI 2022

| No | Nama Pegawai | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 01 | Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li | Ketua | |
| 02 | Ismaya Salindri, S.H., M.H. | Hakim | |
| 03 | Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H. | Hakim | |
| 04 | Ishmatul Lu`Lu, S.H. | Hakim | |
| 05 | Silvia Kumalasari, S.H. | Hakim | |
| 06 | Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. | Hakim | |
| 07 | Dwi Fahriyah Suci Angraini, S.H. | Hakim | |
| 08 | Ruspeliati, S.H. | Panitera | |
| 09 | I Made Landep, S.H. | Sekretaris | |
| 10 | Lelo Herawan, S.H. | Panitera Muda Hukum | |
| 11 | Noorhayati, S.Kom.,S.H. | Panitera Muda Pidana | |
| 12 | Dede Andreas, S.H., M.H. | Panitera Muda Perdata | |

| | | | |
|----|----------------------------|--|---|
| 13 | Samsul Rizal, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan |  |
| 14 | Laili Rahmah, A.Md., M.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana |  |
| 15 | Reinhard Simanjuntak, S.H. | Plt. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan |  |
| 16 | M. Zaldi Akbar, S.H. | Staf Kepaniteraan Perdata |  |
| 17 | Romi Nevriyandra, A.Md. | Pengadministrasi Registrasi Perkara |  |
| 18 | Riviera Jesica M, S.H. | Analisis Perkara Peradilan |  |
| 19 | Janward Sumuang Purba | Jurusita |  |
| 20 | Arofah Azhar, A.Md. | Pengelola Sistem & Jaringan |  |
| 21 | Sinta Kartika Sari | PPNPN |  |
| 22 | Ahmad Faisal Rosadi | PPNPN |  |
| 23 | Vicky Krisli | PPNPN |  |
| 24 | Alfi Fahmi | PPNPN |  |
| 25 | M. Dian . GM | PPNPN |  |
| 26 | Geryawan | PPNPN |  |
| 27 | Rony | PPNPN |  |
| 28 | Lessa Wara'a Ezzana | PPNPN |  |



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau

**DOK
MONEV**



Monitoring dan
Evaluasi Monitoring dan
Evaluasi SAKIP Tahun 2021



Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau



(0513)2027516



pnpulangpisau@gmail.com
www.pn-pulangpisau.go.id



DAFTAR ISI

| | | |
|----|---|----|
| A. | PENDAHULUAN | 2 |
| B. | WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI | 2 |
| C. | HASIL MONITORING DAN EVALUASI | 2 |
| | <i>PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA</i> | 2 |
| | <i>LAPORAN MONEV TAHUNAN TAHUN 2020</i> | 6 |
| D. | KENDALA | 7 |
| E. | TINDAK LANJUT | 7 |
| F. | PENUTUP | 7 |
| | DOKUMENTASI | 8 |
| | <i>PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA</i> | 11 |
| | <i>LAPORAN MONEV TAHUNAN TAHUN 2020</i> | 15 |



A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Hasil Penilaian LKJIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/687/OT.01.2/4/2021 tanggal 19 April 2021 dengan Nilai 70,22% dengan Nilai (BB)

Dari Hasil Penilaian tersebut perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi tentang Pencapaian Nilai LKJIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut.

B. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi LKjIP dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 16 Pebruari 2022 di Ruangan Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Adapun Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI *PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA*

Adapun hasil Penilaian LKjIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut:

| No. | Komponen Penilaian | Kriteria Penilaian | Penilaian |
|-----|---------------------|---|-----------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | Bobot 30% 1) Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan target jangka menengah, namun belum dibuat surat keputusan penetapan Renstra oleh pimpinan. 2) Rumusan tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen Renstra subbab 2.2. belum sepenuhnya selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024. 3) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik | 22,25 % |



| | | | |
|---|--------------------|--|--------|
| | | <p>4) Dokumen Renstra dan RKT belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).</p> <p>5) Pengawasan terhadap pencapaian PK tidak dilakukan secara berkala.</p> <p>6) PK belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.</p> | |
| 2 | Pengukuran Kinerja | <p>Bobot 25%</p> <p>1) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun semesteran dan data kinerja belum dapat diandalkan.</p> <p>2) IKU yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen penganggaran.</p> <p>3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.</p> | 17.48% |
| 3 | Pelaporan Kinerja | <p>Bobot 15%</p> <p>1) LKjIP telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu.</p> <p>2) Penyajian informasi kinerja dalam LKjIP belum memadai.</p> <p>3) LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan dan penilaian kinerja.</p> | 10.89% |
| 4 | Evaluasi Internal | <p>Bobot 10%</p> <p>1) Kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya tidak dipantau secara memadai.</p> <p>2) Hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.</p> <p>3) Rekomendasi pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya d'rtindaklanjuti untuk perbaikan penerapan kinerja.</p> | 6.25% |



| | | | |
|---|--------------------|--|--------|
| 5 | Pencapaian Kinerja | Bobot 20% 1) Target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dan capaiannya lebih baik dari tahun sebelumnya. 2) Informasi output/outcome belum sepenuhnya dapat diandalkan. | 13.33% |
|---|--------------------|--|--------|

Dari penilaian LKJIP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Tujuan agar diselaraskan dengan dokumen Renstra atasannya, yaitu
 - a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, dan
 - b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Selanjutnya agar dirumuskan indikator kinerja untuk tujuan yang sudah ditetapkan tersebut.
- 2) Mengevaluasi perumusan indikator kinerja agar selaras dengan dokumen Renstra atasannya.
- 3) Dokumen Renstra agar ditetapkan dengan surat keputusan oleh pimpinan satuan kerja.
- 4) Agar dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut agar dimanfaatkan sebagai dasar penilaian keberhasilan kinerja unit serta digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun berikutnya.
- 5) Dokumen Renstra dan RKT dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA.
- 6) PK agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.



b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pemantauan dan pengumpulan data kinerja seharusnya dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun semesteran, serta dilakukan evaluasi atas hasil pengukuran untuk peningkatan kinerja.
- 2) IKU yang disusun agar dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 3) Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai acuan untuk penetapan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) LKjIP seharusnya menyajikan informasi keuangan yang memadai dikaitkan dengan pencapaian kinerja.
- 2) LKjIP agar digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan dan penilaian kinerja. Capaian kinerja yang terlalu tinggi atau rendah agar dievaluasi untuk disesuaikan kembali dalam penetapan target kinerja untuk tahun berikutnya.

d. Evaluasi internal

- 1) Kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya agar dipantau secara berkala, baik bulanan, triwulan dan semesteran.
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja agar dijadikan sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dilanjutkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja serta digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.



e. Pencapaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator kinerja agar memperhatikan target yang telah ditetapkan dan keselarasan dokumennya, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan, sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau *output/outcome* yang memadai.

LAPORAN MONEV TAHUNAN TAHUN 2021

- Komponen SAKIP tahun 2021 Telah lengkap diupload
- Hasil Laporan Capaian Kinerja per Bulan adalah sebagai berikut:

| No | Bulan | Laporan capaian Kinerja | Keterangan |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Januari 2021 | 109,15% | Sesuai target |
| 2 | Pebruari 2021 | 81,47% | Di Bawah Target |
| 3 | Maret 2021 | 96,82% | Di Bawah Target |
| 4 | April 2021 | 66,89% | Di Bawah Target |
| 5 | Mei 2021 | 122,20% | Sesuai target |
| 6 | Juni 2021 | 122,47% | Sesuai target |
| 7 | Juli 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 8 | Agustus 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 9 | September 2021 | 104,89% | Sesuai target |
| 10 | Oktober 2021 | 104,38% | Sesuai target |
| 11 | Nopember 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 12 | Desember 2021 | 135,56% | Sesuai target |

- Monitoring Capaian kinerja Kumulatif triwulan

| No | Triwulan | Laporan capaian Kinerja | Keterangan |
|----|----------|-------------------------|-----------------|
| 1 | I | 97,32% | Di Bawah Target |
| 2 | II | 103,34% | Sesuai target |



| | | | |
|---|-----|---------|---------------|
| 3 | III | 103,65% | Sesuai target |
| 4 | IV | 107,39% | Sesuai target |

D. KENDALA

-


E. TINDAK LANJUT

Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap LKJiP tersebut perlu ditingkatkan untuk beberapa point agar kedepannya LJKIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat mempertahankan nilai yang ada atau meningkatkan nilai tersebut menjadi A.

F. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan baru atau mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Pulang Pisau, 16 Pebruari 2022
Yang Melaksanakan Monev
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI



DOKUMENTASI



**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI LKJIP**

| | | |
|----------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Rabu / 16 Pebruari 2022 |
| P u k u l | : | 08.00 WIB |
| Tempat | : | Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau |
| Agenda | : | Monitoring dan Evaluasi SAKIP TA 2021 |
| Pimpinan Rapat | : | |
| Notulis | : | |
| Peserta Rapat | : | |

RINGKASAN ACARA

1. **Pembukaan**
Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau selaku Pihak yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

2. **Hasil Monitoring dan Evaluasi**

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Adapun hasil Penilaian LKjIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut:

| No. | Komponen Penilaian | Kriteria Penilaian | Penilaian |
|-----|---------------------|---|-----------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | Bobot 30% 7) Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan target jangka menengah, namun belum dibuat surat keputusan penetapan Renstra oleh pimpinan. 8) Rumusan tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen Renstra subbab 2.2. belum sepenuhnya selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024. 9) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik 10) Dokumen Renstra dan RKT belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 11) Pengawasan terhadap pencapaian PK tidak dilakukan secara berkala. | 22,25 % |



| | | | | |
|---|--------------------|-----------|--|--------|
| | | | 12) PK belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. | |
| 2 | Pengukuran Kinerja | Bobot 25% | 4) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun semesteran dan data kinerja belum dapat diandalkan. 5) IKU yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen penganggaran. 6) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. | 17.48% |
| 3 | Pelaporan Kinerja | Bobot 15% | 4) LKjIP telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu. 5) Penyajian informasi kinerja dalam LKjIP belum memadai. 6) LKjIP belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan dan penilaian kinerja. | 10.89% |
| 4 | Evaluasi Internal | Bobot 10% | 4) Kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya tidak dipantau secara memadai. 5) Hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. 6) Rekomendasi pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya d'rtindaklanjuti untuk perbaikan penerapan kinerja. | 6.25% |
| 5 | Pencapaian Kinerja | Bobot 20% | 3) Target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dan capaiannya lebih baik dari tahun sebelumnya. 4) Informasi output/outcome belum | 13.33% |



seungguhnya dapat diandalkan.

Dari penilaian LKJiP tersebut maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LJKIP agar nilai yang didapat dapat dipertahankan dan ditingkatkan di dalam periode selanjutnya.

A. Perencanaan Kinerja

- 1) Tujuan agar diselaraskan dengan dokumen Renstra atasannya, yaitu
 - c. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, dan
 - d. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Selanjutnya agar dirumuskan indikator kinerja untuk tujuan yang sudah ditetapkan tersebut.
- 2) Mengevaluasi perumusan indikator kinerja agar selaras dengan dokumen Renstra atasannya.
- 3) Dokumen Renstra agar ditetapkan dengan surat keputusan oleh pimpinan satuan kerja.
- 4) Agar dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut agar dimanfaatkan sebagai dasar penilaian keberhasilan kinerja unit serta digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun berikutnya.
- 5) Dokumen Renstra dan RKT dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA.
- 6) PK agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja

- 1) Pemantauan dan pengumpulan data kinerja seharusnya dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan maupun semesteran, serta dilakukan evaluasi atas hasil pengukuran



untuk peningkatan kinerja.

- 2) IKU yang disusun agar dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 3) Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai acuan untuk penetapan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

C. Pelaporan Kinerja

- 1) LKjIP seharusnya menyajikan informasi keuangan yang memadai dikaitkan dengan pencapaian kinerja.
- 2) LKjIP agar digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan dan penilaian kinerja. Capaian kinerja yang terlalu tinggi atau rendah agar dievaluasi untuk disesuaikan kembali dalam penetapan target kinerja untuk tahun berikutnya.

D. Evaluasi internal

- 1) Kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya agar dipantau secara berkala, baik bulanan, triwulan dan semesteran.
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja agar dijadikan sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja serta digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

E. Pencapaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator kinerja agar memperhatikan target yang telah ditetapkan dan keselarasan dokumennya, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja



berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan, sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau *output/outcome* yang memadai.

LAPORAN MONEV TAHUNAN TAHUN 2021

- Komponen SAKIP tahun 2021 Telah lengkap diupload
- Hasil Laporan Capaian Kinerja per Bulan adalah sebagai berikut:

| No | Bulan | Laporan capaian Kinerja | Keterangan |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Januari 2021 | 109,15% | Sesuai target |
| 2 | Pebruari 2021 | 81,47% | Di Bawah Target |
| 3 | Maret 2021 | 96,82% | Di Bawah Target |
| 4 | April 2021 | 66,89% | Di Bawah Target |
| 5 | Mei 2021 | 122,20% | Sesuai target |
| 6 | Juni 2021 | 122,47% | Sesuai target |
| 7 | Juli 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 8 | Agustus 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 9 | September 2021 | 104,89% | Sesuai target |
| 10 | Oktober 2021 | 104,38% | Sesuai target |
| 11 | Nopember 2021 | 103,95% | Sesuai target |
| 12 | Desember 2021 | 135,56% | Sesuai target |

- Monitoring Capaian kinerja Kumulatif triwulan

| No | Triwulan | Laporan capaian Kinerja | Keterangan |
|----|----------|-------------------------|-----------------|
| 1 | I | 97,32% | Di Bawah Target |
| 2 | II | 103,34% | Sesuai target |
| 3 | III | 103,65% | Sesuai target |
| 4 | IV | 107,39% | Sesuai target |



3. Dokumentasi



4


Penutup

Monitoring dan Evaluasi Monev SAKIP Tahun 2021 ditutup pada Pukul 11.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

PENGESAHAN
PIMPINAN RAPAT

KETUA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,




DIAN NUR PRATIWI

NOTULIS


AROFAH AZHAR





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



**Jalan Tingang Menteng No.39,
Pulang Pisau 748111, Kab.
Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah**



www.pn-pulangpisau.go.id
pnpulangpisau@gmail.com



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET (%) | | | |
|----|--|---|------------|-----|-----|-----|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 23 | 46 | 71 | 95 |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 23 | 46 | 71 | 95 |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 18 | 36 | 54 | 70 |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 20 | 40 | 60 | 80 |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 23 | 46 | 69 | 90 |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | - | - | 75 | 75 |

| No. | Aksi / Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Keluaran | Program | Kegiatan | Dana (Rp) |
|-----|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu | √ | | | | Terdatanya sisa perkara tahun lalu | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian sisa Perkara Perdata dan Pidana | - |
| 2 | Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu | √ | | | | Teridentifikasi permasalahan penghambat | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian sisa Perkara Perdata dan Pidana | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|---|---|------------|
| | | | | | | penyelesaian perkara | | | |
| 3 | Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu | √ | √ | | | Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian sisa Perkara Perdata dan Pidana | - |
| 4 | Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | BAS selesai tepat waktu | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | - |
| 5 | Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Pelaksanaan PBT tepat waktu | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | 5.150.000 |
| 6 | Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Minutasi Perkara tepat waktu | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | 2.250.000 |
| 7 | Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara | √ | √ | √ | √ | Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | 44.450.000 |
| 8 | Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan | √ | √ | √ | √ | terdeteksi potensi penyelesaian perkara | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | |
| 9 | Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan | √ | √ | √ | √ | Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | |
| 10 | Melaporkan dan mencari solusi yang tepat | √ | √ | √ | √ | Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | |
| 11 | Melaksanakan persidangan sesuai | √ | √ | √ | √ | Terlakasannya persidangan cepat | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan | | | | | sederhana dan biaya ringan | | Waktu | |
| 12 | Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan | √ | √ | √ | √ | Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | |
| 13 | Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan | √ | √ | √ | √ | Perkara yang diputus | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | |
| 14 | Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran | √ | √ | √ | √ | Perkara yang sudah melebihi batas waktu | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Tepat Waktu | |
| 15 | Merekap Perkara yang melakukan Upaya Hukum | √ | √ | √ | √ | Upaya Hukum | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK | - |
| 16 | Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat | | √ | | | Terbentuknya TIM Evaluasi | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | - |
| 17 | Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat | | √ | | | Job Description Tim SKM | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | - |
| 18 | Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat | | √ | | | Jadwal dan Perangkat SKM | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|----------------|---|----------------------------|---|
| 19 | Melaksanakan SKM | | | √ | | Kuesioner SKM | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | - |
| 20 | Mendata dan merekap hasil SKM | | | √ | | Data Hasil SKM | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | - |
| 21 | Menyusun Laporan Hasil SKM | | | √ | | Laporan SKM | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | - |
| 22 | Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen | | | √ | √ | CPAR | Program Peningkatan Mutu Badan Peradilan Umum | Survey Kepuasan Masyarakat | - |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET (%) | | | |
|----|--|--|------------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 23 | 46 | 71 | 95 |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 23 | 46 | 71 | 95 |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 23 | 46 | 71 | 95 |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 23 | 46 | 69 | 90 |

| No. | Aksi / Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Keluaran | Program | Kegiatan | Dana (Rp) |
|-----|---|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|--|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan | √ | √ | √ | √ | Jadwal Sidang Tundaan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan | - |
| 2 | Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan | √ | √ | √ | √ | BAS | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | - |
| 3 | Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan | √ | √ | √ | √ | Putusan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|---|
| 4 | Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan | √ | √ | √ | √ | Data Putusan di SIPP | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | - |
| 5 | Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc) | √ | √ | √ | √ | e-doc Salinan Putusan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | - |
| 6 | Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan | √ | √ | √ | √ | Hasil Evaluasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | - |
| 7 | Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator | √ | | | | SK dan Jadwal Mediator | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | - |
| 8 | Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi | √ | √ | √ | | Publikasi Nama dan Jadwal Mediator | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | - |
| 9 | Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator | √ | √ | √ | | Usulan Diklat mediator | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | - |
| 10 | Menyiapkan instrumen- instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi | √ | √ | √ | | Instrumen Pelaksanaan Mediasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | - |
| 11 | Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi | √ | √ | √ | | Sarana Mediasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | - |
| 12 | Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi | √ | √ | √ | | Laporan Pelaksanaan Mediasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis | Perkara Yang Dimediasi | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|-----------|
| | | | | | | Lainnya | | | |
| 13 | Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP | √ | √ | √ | | Status Putus perkara di SIPP | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | - |
| 14 | Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Kendali | √ | √ | √ | | Pencatatan Buku Kendali | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | - |
| 15 | Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register | √ | √ | √ | | Pencatatan Buku Register | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | - |
| 16 | Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK | √ | √ | √ | | Perintah Pemberitahuan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | - |
| 17 | Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK | √ | √ | √ | | Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | - |
| 18 | Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B | √ | √ | √ | | Bundel A dan Bundel B | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | - |
| 19 | Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK | √ | √ | √ | | Bukti Kirim Biaya | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | 1.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|---|
| 20 | Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK | √ | √ | √ | | Dokumen digital Bundel A dan Bundel B | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | - |
| 21 | Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK | √ | √ | √ | √ | Hasil Evaluasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | - |
| 22 | Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat | √ | √ | √ | √ | Data Perkara yang menarik perhatian | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | - |
| 23 | Memeriksa status pemeriksaan perkara | √ | √ | √ | √ | Status Perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | - |
| 24 | Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat | √ | √ | √ | √ | Berkas Perkara Lengkap | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | - |
| 25 | Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat | √ | √ | √ | √ | Anonimasi Putusan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | - |
| 26 | Mengupload putusan yang sudah dianonimasi | √ | √ | √ | √ | Putusan terupload | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | - |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET (%) | | | |
|----|---|--|------------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 1 | 2 | 4 | 5 |

| No. | Aksi / Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Keluaran | Program | Kegiatan | Dana (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|-----------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP | √ | | | | Pengumuman Rencana Pengadaan | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Layanan Bantuan Hukum | 24.000.000 |
| 2 | Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum | √ | | | | Permohonan Pejabat/Pokja | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Layanan Bantuan Hukum | |
| 3 | Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi Posbakum | √ | | | | Proses Pengadaan | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Layanan Bantuan Hukum | |
| 4 | Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum | √ | √ | √ | √ | Layanan Posbakum | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Layanan Bantuan Hukum | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|--|-----------------------|--|
| 5 | Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum | √ | √ | √ | √ | Hasil Evaluasi | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Layanan Bantuan Hukum | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|--|-----------------------|--|

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET (%) | | | |
|----|--|---|------------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 23 | 46 | 69 | 90 |

| No. | Aksi / Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan (Triwulan) | | | | Keluaran | Program | Kegiatan | Dana (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|---|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Tetap | √ | √ | √ | √ | Daftar Perkara BHT | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | - |
| 2 | Memeriksa kelengkapan eksekusi | √ | √ | √ | √ | Ceklist Kelengkapan Eksekusi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | - |
| 3 | Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi | √ | √ | √ | √ | Permohonan Eksekusi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | - |
| 4 | Melaksanakan Eksekusi | √ | √ | √ | √ | Pelaksanaan Eksekusi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | - |
| 5 | Melakukan | √ | √ | √ | √ | Hasil Koordinasi | Program Dukungan | Persentase Putusan | - |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT) | | | | | Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



 KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



 NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.



REVIU KE-I INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Negeri Pulang Pisau TAHUN 2021



Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau
74812, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnulangpisau@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/31/KPN/OT.01/SK/02/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II TAHUN 2021

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang

digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2020 - 2024.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja ;
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.

Pada Tanggal : 16 Pebruari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



[Handwritten Signature]
DIAN NUR PRATIWI

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
 DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/31/KPN/OT.01/SK/02/2022
 TANGGAL : 16 PEBRUARI 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II TAHUN 2021

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|---|--|---|------------------|---|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk)</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|---------------|--|--|------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | | |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = banding * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = kasasi | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|-------------------------------------|---|--|------------------|---|
| | | | * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | | |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi | $\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim | $\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|----------------------|--|---|------------------|---|
| | Penyelesaian Perkara | kepada Para Pihak tepat waktu | | | |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang diputus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|---|--|--|------------------|---|
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan * Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| 5 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau | Persentase pengawasan keuangan perkara | $\frac{\text{Jumlah Pengawasan Keuangan Perkara}}{12} \times 100\%$ | Sekretaris | Laporan Pengawasan Bulanan |
| | | Persentase pengawasan keuangan DIPA | $\frac{\text{Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA}}{12} \times 100\%$ | Sekretaris | Laporan Pengawasan Bulanan |
| | | Persentase pengawasan bidang administrasi umum | $\frac{\text{Pengawasan Administrasi Umum}}{12} \times 100\%$ | Sekretaris | Laporan Pengawasan Bulanan |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis | $\frac{\text{SDM Yang Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah SDM}} \times 100\%$ | Sekretaris | Laporan Tahunan Kepegawaian |

| | | | |
|---|--|------------|------------------------------------|
| Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum | $\frac{\text{SDM Yang Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah SDM}} \times 100\%$ | Sekretaris | Laporan Tahunan Kepegawaian |
| Persentase realisasi PNBP | $\frac{\text{Realisasi PNBP}}{\text{Target Estimasi PNBP}} \times 100\%$ | Sekretaris | Laporan Realisasi Anggaran PNBP |
| Persentase realisasi anggaran belanja | $\frac{\text{Realisasi DIPA BUA} + \text{Realisasi DIPA BADILUM}}{2}$ | Sekretaris | Laporan Realisasi Anggaran Belanja |

KEPADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DIAN NUR PRATIWI



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/01/KPN/OT.01/SK/01/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
TAHUN 2020 - 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II TAHUN 2020 - 2024

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang

digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2020 - 2024.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

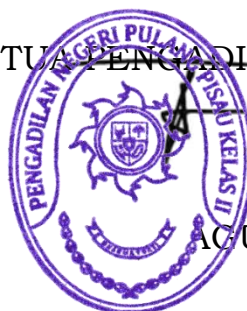
Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja ;
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II
 DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/01/KPN/OT.01/SK/01/2020
 TANGGAL : 02 JANUARI 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II TAHUN 2020 -2024

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|---|--|---|------------------|---|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk)</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

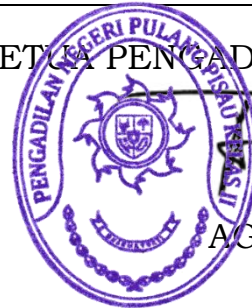
| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|---------------|--|--|------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | | |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = banding * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = kasasi | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|-------------------------------------|---|--|------------------|---|
| | | | * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | | |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Upaya hukum = PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi | $\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim | $\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|----------------------|--|---|------------------|---|
| | Penyelesaian Perkara | kepada Para Pihak tepat waktu | | | |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| | | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang diputus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber data |
|-----|---|--|--|------------------|---|
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan * Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO



**Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516**



www.pn-pulangpisau.go.id



pnpulangpisau@gmail.com



RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2021



Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau
74812, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnulangpisau@gmail.com



RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
 Tahun Anggaran : 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7 % |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |

Ditetapkan di : Pulang Pisau
 Pada Tanggal : 03 Januari 2020



Jetua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,

AGUNG NUGROHO, S.H.
 NIP. 19720307 200003 1 003



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2021



**Jalan Tingang Menteng No.39,
Pulang Pisau 748111, Kab.
Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah**



www.pn-pulangpisau.go.id
pnpulangpisau@gmail.com



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2021



Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau
74812, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah
Telp. (0513) 2027516



www.pn-pulangpisau.go.id



pnulangpisau@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama.**

Nama : H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H
Jabatan : KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperkuan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulang Pisau, Januari 2021

Pihak Kedua

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H
NIP. 19590511 198403 1 004

Pihak Pertama

NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.
NIP. 19770112 200112 2 001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 96 % |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 96 % |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 71 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 % |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 % |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2 % |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 80 % |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 96 % |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 96 % |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2 % |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 95 % |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 % |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 7 % |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |

| Pengadilan | | | |
|------------|---|---|-----|
| 5 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau | Persentase pengawasan keuangan perkara | 90% |
| | | Persentase pengawasan keuangan DIPA | 90% |
| | | Persentase pengawasan bidang administrasi umum | 90% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan teknis | 10% |
| | | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan administrasi umum | 10% |
| | | Persentase realisasi PNBP | 50% |
| | | Persentase realisasi anggaran belanja | 90% |

| No | Kegiatan | Anggaran | |
|----|---|----------|----------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 4,000,524,000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. | 23,887,455,000 |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. | 68,550,000 |
| | | | |

Pulang Pisau, Januari 2021

Pihak Kedua



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H
NIP. 19590511 198403 1 004

Pihak Pertama



NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.
NIP. 19770112 200112 2 001



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Kabupaten Pulang Pisau